

**KAJIAN PEMANFAATAN RUANG PESISIR KOTA TERNATE
PROPINSI MALUKU UTARA
(Studi Kasus Kawasan Permukiman di Atas Laut Kelurahan Makassar Timur)**

**Tesis
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Mencapai Derajat Sarjana S-2**



**Restuina Irene Djafar
L4K002018**

**PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER ILMU LINGKUNGAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2004**


TESIS
KAJIAN PEMANFAATAN RUANG PESISIR KOTA TERNATE PROPINSI
MALUKU UTARA
(Studi Kasus Kawasan Permukiman di Atas laut Kelurahan Makassar Timur)

Disusun oleh
Restuina Irene Djafar
L4K002018


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada Tanggal 31 Agustus 2004
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Menyetujui,

Pembimbing I


(Ir. Wahyu Krisna, MT)

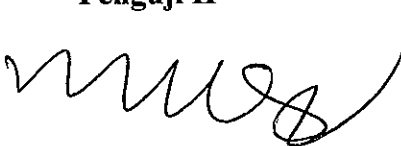
Pembimbing II


(Dra. Sri Suryoko, Msi)

Penguji I



(Prof. Dr Sudharto P Hadi, MES)

Penguji II


(Ir. Parfi Kadiyanto, MSi)



Mengetahui,
Ketua Program
Magister Ilmu Lingkungan


(Prof. Dr. Sudharto P Hadi, MES)

UPT-PUSTAK-UNDIP	
No. Daft:	3889/T/ML/C/
Tgl.	4/3 05

ABSTRAK

Kota Ternate merupakan kota kepulauan dengan perkembangan aktivitas kota dan masyarakatnya berlangsung di sepanjang wilayah pesisir. Sebagai salah satu kota pulau, maka misi pembangunan wilayah adalah menjadikan Kota Ternate sebagai kota pantai yang memiliki keseimbangan ekologis, geologis menuju terciptanya kawasan pesisir yang tertata indah, bersih dan sehat. Pembangunan Kota Ternate diarahkan pada upaya meningkatkan dan mengembangkan kota dalam suatu sistem wilayah kepulauan melalui penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang dapat memberi ciri sebagai kota pantai.

Penelitian dilakukan pada permukiman di atas laut yang terletak di kelurahan Makassar Timur Kota Ternate. Lokasi penelitian tersebut berada di pusat kota dan termasuk dalam Bagian Wilayah Kota I (BWK I) yang diperuntukkan untuk kegiatan dengan intensitas tinggi, seperti perdagangan, perkantoran, permukiman, terminal, dan pelabuhan. Arah dalam RDTRK Kota Ternate tahun 2001 – 2005 belum secara khusus mengatur tentang pemanfaatan ruang pesisir. Hal tersebut tentunya tidak sejalan dengan misi pengembangan Kota Ternate sehingga menyebabkan terjadinya pemanfaatan ruang yang tidak terkontrol dan menimbulkan dampak negatif.

Pertumbuhan permukiman di sepanjang pesisir Kota Ternate merupakan fenomena yang dipengaruhi oleh permasalahan dinamika pertumbuhan kota pantai, peningkatan jumlah penduduk dan kondisi sosial ekonomi masyarakat pesisir tetapi di sisi lain membawa dampak pada penurunan kualitas lingkungan wilayah pesisir. Tidak tersedianya sarana infrastruktur permukiman yang memadai khususnya prasarana pengelolaan sampah dan perilaku hidup masyarakat pesisir yang membuang sampah langsung ke laut menjadi penyebab menurunnya kualitas lingkungan pesisir.

Penelitian ini diarahkan untuk mencari solusi pendekatan terhadap dampak sampah di lingkungan pesisir akibat keberadaan permukiman penduduk sebagai salah satu bentuk pemanfaatan ruang pesisir. Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan data primer yang diperoleh dari pengamatan lapangan dan pengisian kuesioner, dan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dan instansi terkait. Pengambilan sampel dengan menggunakan metode Purposive Sampling pada penduduk yang tinggal di darat dan yang tinggal di permukiman atas laut, juga wawancara terhadap tokoh masyarakat dan tokoh formal kelurahan dan instansi terkait.

Hasil dari penelitian ini adalah model penataan kawasan permukiman atas laut yang lebih sehat dan mempunyai nilai estetika dengan perhatian utama pada arahan penggunaan ruang pesisir dalam dokumen tata ruang kota. Faktor penyediaan infrastruktur permukiman yang mampu menunjang kenyamanan permukiman penduduk di atas laut terkait dengan penyediaan prasarana pengelolaan sampah dan akses jalan yang memadai. Hal penting lain adalah partisipasi masyarakat melalui keikutsertaan secara langsung yang diwujudkan dalam program mandiri untuk menjaga kualitas lingkungan pesisir.

Kata Kunci : Ruang pesisir, permukiman di atas laut, perilaku masyarakat, kualitas lingkungan, infrastruktur permukiman, partisipasi masyarakat.

ABSTRACT

Town of Ternate represent island town with growth of society activity alongside coastal area. As one of the island town, development mission is make town of Ternate as coastal town which have ecological and geologis balance, become a beautiful coastal area, neat and clean. Development of town of Ternate aimed at effort to improve and develop town into a regional archipelago system by providing and increasing infrastucture to give special characteristic as coastal town.

Research was done at settlement above sea which located in sub-district of Makassar, east town of Ternate. The research location reside in central of the town and including Part of Town I Region (BWK I) destined for activity with high intensity, like commerce, with colars, settlement, terminal, and port. Instruction in RDTRK of Ternate town year 2001 – 2005 not yet peculiarly determine the usage of coastal area. That matter is of course not suit according with urban development mission of Ternate so that cause the uncontrolling exploitation and causing negative impact.

Growth of settlement alongside coastal area of Ternate town represent phenomenon influenced by problems of dynamics growth of coastal town, the growth of population and social economic condition but in the other hand cause decreasing of coastal area quality. The condition with unavailable of settlement infrastucture especially garbage management facility and management of life behaviour throwing garbage directly into sea cause coastal area quality.

This research is instructed to look for approach solution to garbage impact in coastal area enviroment because the existence of settlement as one of the form exploiting of coastal area. Qualitatif research method used to describe primary data from given questioner and observation, and sekunder data obtained of literature study and relevan institution. Sample take by using Purposive Sampling Method at resident who live in land and who live in settlement of sea, also by interview to elite figure and formal figure of related institution and sub-district.

Result of this research is model settlement of settlement area of helththier sea and have esthetics with especial attention of instruction usage of coastal area in town planology document. The available of infrastructure factor of settlement capable to support freshment settlement of resident above the sea related to available garbage management facility and enough way of acces. The other important matter is society participation of passing taking part in directly realized in self supporting program to take care of the quality of coastal area enviroment.

Key Word : Coastal area, Settlement above sea, Behavioural of society, Quality of enviroment, Infrastructure of settlement, Society participation.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT atas kehadirat-NYA yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga tesis ini dapat diselesaikan sebagai persyaratan untuk mencapai derajat sarjana S2 serta memperoleh gelar Magister Sains (MSi) pada program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro.

Tesis ini merupakan bentuk kepedulian penulis terhadap pengembangan Kota Ternate serta Maluku Utara secara umum melalui pemanfaatan ruang pesisir dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan. Penulis berharap Tesis ini dapat menjadi masukan dalam penyusunan dokumen Tata Ruang Kota Ternate yang lebih mengakomodasi kondisi dan permasalahan lokal.

Dengan selesainya penulisan tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan turut mendukung memberikan bantuan materiil maupun moril, khususnya :

1. Prof. Dr. Sudharto P. Hadi, MES selaku Ketua Program Magister Ilmu Lingkungan Universitas Diponegoro sekaligus sebagai Tim Penguji Tesis
2. Ir. Agus Hadiyanto, MT selaku Sekretaris Program Magister Ilmu Lingkungan atas bantuannya selama kami menjalani kuliah
3. Ir. Wahyu Krisna, MT. selaku pembimbing satu yang telah banyak memberikan arahan dan dorongan selama penyusunan Tesis
4. Dra. Sri Suryoko, MSi. selaku pembimbing kedua yang telah banyak memberikan arahan dan motivasi selama penyusunan Tesis
5. Ir. Parfi Kadiyanto MSi selaku Anggota Tim penguji Tesis yang telah memberikan masukan yang bermanfaat dalam penyusunan tesis.
6. Bpk. Drs. Musa Badrun, MBA. selaku Sekda Propinsi Maluku utara atas pemberian ijin dalam melaksanakan studi S2
7. Drs. Adjuan Gafur selaku Kepala Dinas Perindag Propinsi Maluku Utara atas dukungan dan ijin untuk melaksanakan studi S2
8. Kabid. Fispras. Bappeda Kota Ternate yang banyak membantu dalam pengumpulan data
9. Pimpro P2P Dinas Kimprswil Kota Ternate atas informasi dan wawancara yang berkaitan dengan lokasi penelitian
10. Camat Ternate Utara atas pemberian informasi yang berkaitan dengan lokasi penelitian
11. Bpk. Ismail Tjun selaku Lurah Makassar Timur dan staff yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian di lapangan
12. Papa, Mama serta adik-adikku tercinta Iman, Iin dan Ria atas doa, kasih sayang dan dukungan selama melaksanakan studi S2
13. K'adiyang telah banyak membantu dan pengertian selama pengerjaan tesis ini.

Kritik dan saran sangat diharapkan untuk dapat lebih menambah wawasan penulis di masa yang akan datang. Harapan penulis semoga tesis ini bermanfaat bagi kita semua. Amien.

Semarang, Agustus 2004
Penulis,

Restuina Irene Djafar
L4K002018

DAFTAR ISI

	Hal
Lembar Pengesahan	i
Abstrak	ii
<i>Abstract</i>	iii
Kata Pengantar	iv
Daftar isi	v
Daftar Gambar	viii
Daftar Tabel	ix
Daftar Lampiran	x
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Perumusan Masalah	4
1.3. Tujuan Penelitian	4
1.4. Manfaat Penelitian	5
1.5. Lingkup Penelitian	5
1.6. Keaslian Penelitian	5
1.7. Kerangka Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir	8
2.1.1. Pengertian	8
2.1.2. Kegunaan	9
2.1.3. Aplikasi	11
2.2. Sifat Penataan Ruang Kelautan dan Pesisir	12
2.3. Pemilihan Daerah Permukiman	15
2.4. Partisipasi Masyarakat	17
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Lokasi Penelitian	21
3.2. Variabel Penelitian	21
3.3. Teknik Pengumpulan Sampel	21
3.4. Teknik Pengambilan Data.....	22
3.5. Teknik Analisis Data.....	22
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
4.1. Rona Lingkungan Daerah Penelitian	24
4.1.1. Kondisi Geografis	24
4.1.2. Kondisi Topografi	26
4.1.3. Awal Mula Permukiman Atas Laut	26

4.2. Hasil Penelitian	27
4.2.1. Kesesuaian Ruang Permukiman AtasLaut Menurut RDTRK	27
4.2.2. Kondisi Sosial Ekonomi.....	28
4.2.2.1. Komposisi Responden Berdasarkan Mata Pencaharian.....	
4.2.2.2. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	29
4.2.2.3. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan	30
4.2.2.4. Jenis Kegiatan Lain di Tempat Tinggal	30
4.2.2.5. Komposisi Responden Berdasarkan Asal Daerah	31
4.2.2.6. Komposisi Responden Berdasarkan Lama Tinggal	32
4.2.2.7. Alasan Pemilihan Tempat Tinggal	32
4.2.3. Kondisi Lingkungan Permukiman	33
4.2.3.1. Sumber Sampah di Lingkungan Permukiman	34
4.2.3.2. Tingkat Kenyamanan dan sebab Ketidaknyamanan	34
4.2.3.3. Tempat Akhir Buangan Masyarakat Setempat	34
4.2.3.4. Penyakit yang sering diderita dan Tindakan Pengobatan	35
4.2.4. Kondisi Infrastruktur Permukiman	36
4.2.4.1. Kondisi Fisik Rumah Penduduk	37
4.2.4.2. Sumber Pelayanan air Bersih	37
4.2.4.3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Air Bersih	37
4.2.4.4. Pelayanan Listrik	38
4.2.4.5. Tingkat kepuasan Pelayanan Listrik	38
4.2.4.6. Prasarana Sampah dan Kepuasan Pelayanan Sampah	39
4.2.4.7. Pelayanan Akses Jalan	39
4.2.4.8. Tingkat Kepuasan Pelayanan Sarana Jalan	40
4.2.4.9. Pelayanan Sarana Buangan MCK	41
4.2.4.10. Tingkat Kepuasan Pelayanan Prasarana MCK	41
4.2.5. Kegiatan Bersama Masyarakat	42
4.2.5.1. Persepsi Masyarakat tentang Kebersihan Lingkungan	43
4.2.5.2. Frekwensi Kerja Bhakti	43
4.2.5.3. Objek Kegiatan Kerja Bhakti	43
4.3. Pembahasan	44
4.3.1. Kesesuaian Peruntukan Ruang Pesisir	45
4.3.1.1. Perda nomor 1 tahun 2001	45
4.3.1.2. Penataan Garis Sempadan Pantai	46
4.3.1.3. Perda nomor 2 tahun 2001	46
4.3.1.4. Perda nomor 3 tahun 2001	47
4.3.2. Analisa Kebutuhan Prasarana Permukiman	47
4.3.2.1. Pelayanan Air Bersih	50
4.3.2.2. Pelayanan Sarana Sampah	50
4.3.2.3. Pelayanan Akses Jalan	50
4.3.2.4. Pelayanan Listrik	52
4.3.2.5. Pelayanan MCK	53

4.3.3. Analisa Peran Serta Masyarakat	55
4.3.3.1. Persepsi tentang Kebersihan	55
4.3.3.2. Frekwensi Kerja Bhakti	56
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1. Kesimpulan	57
5.2. Rekomendasi	59
Skema Model Penataan Kawasan Permukiman Atas Laut.....	62
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Kota Ternate	3
Gambar 1.2 Kerangka Pikir Penelitian	7
Gambar 4.1 Peta Kelurahan Makassar Timur	25
Gambar 4.2 Grafik Komposisi Responden Berdasarkan Mata Pencaharian	29
Gambar 4.3 Grafik Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan	30
Gambar 4.4 Grafik Komposisi Responden Berdasarkan Pendapatan	31
Gambar 4.6 Grafik Komposisi Penduduk Berdasarkan Asal Daerah	32
Gambar 4.7 Grafik Komposisi Penduduk Berdasarkan Lama Tinggal	33
Gambar 4.8 Grafik Alasan Pemilihan Tempat Tinggal	33
Gambar 4.9 Grafik Asal Sampah	34
Gambar 4.10 Grafik Kenyamanan Permukiman	34
Gambar 4.11 Grafik Penyebab Ketidaknyamanan	34
Gambar 4.12 Kondisi Wilayah Laut Tercemar Sampah	35
Gambar 4.13 Grafik Tempat Pembuangan Sampah	35
Gambar 4.14 Grafik Penyakit yang diderita Masyarakat	36
Gambar 4.15 Grafik Tindakan Pengobatan	36
Gambar 4.16 Grafik Tipe Rumah	37
Gambar 4.17 Sumur Pompa Sebagai Sumber Air Bersih	38
Gambar 4.18 Grafik Sumber Air Bersih	38
Gambar 4.19 Grafik Tingkat Pelayanan Air Bersih	38
Gambar 4.20 Grafik Pelayanan Listrik	39
Gambar 4.21 Grafik Tingkat Kepuasan Pelayanan Listrik	39
Gambar 4.22 Grafik Tingkat Kepuasan Pelayanan Sampah	39
Gambar 4.23 Pelayanan Akses Jalan	40
Gambar 4.24 Tingkat Kepuasan Prasarana Jalan	41
Gambar 4.25 Jenis Prasarana Jalan	41
Gambar 4.26 Jenis Buangan MCK	42
Gambar 4.27 Jenis WC Gantung	42
Gambar 4.28 Jenis WC dengan Tangki Septik	42
Gambar 4.29 Grafik Tingkat Kepuasan Prasarana MCK	42
Gambar 4.30 Grafik Persepsi Masyarakat tentang Kebersihan Lingkungan	43
Gambar 4.31 Grafik Frekwensi Kerja Bhakti	43
Gambar 4.32 Grafik Objek Kegiatan Kerja Bhakti	44
Gambar 4.33 Kondisi Laut Tercemar Sampah di Kawasan Pesisir	45
Gambar 4.34 Peta pembagian Blok BWK 1 Kota Ternate	49
Gambar 4.35 Kali Kering sebagai Tempat Buangan Sampah	51
Gambar 4.36 Akses Jalan dari Swadaya Masyarakat	52
Gambar 4.37 Jenis WC tanpa Tangki Septik	54
Gambar 4.38 Prioritas Harapan Masyarakat terhadap Sarana Permukiman	55

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Komposisi Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian dan Tingkat pendidikan	28
Tabel 2. Komposisi Responden berdasarkan Mata Pencaharian	29
Tabel 3. Komposisi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan	30
Tabel 4. Jenis Kegiatan Lain di Tempat Tinggal	31
Tabel 5. Penyakit yang sering diderita dan Tindakan Pengobatan	36

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran A. Kuesioner Penelitian

Lampiran B. Tabulasi Data Kuesioner

Lampiran C. Foto Permukiman Atas Laut di Kelurahan Makassar Timur

B A B I

P E N D A H U L U A N

1.1. Latar Belakang

Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa kepada bangsa Indonesia dengan letak dan kedudukan yang strategis sebagai sebuah negara kepulauan. Wilayah pesisir adalah bagian yang penting dari karakteristik geografis negara kepulauan.

Wilayah pesisir memiliki sumberdaya yang potensial untuk dimanfaatkan keanekaragaman isi yang dikandungnya menjanjikan hari depan yang lebih baik bila pengelolaannya dilakukan secara bijaksana. Selain itu, berbagai fungsi wilayah pesisir seperti sistem penyangga kehidupan, perlindungan pantai sangat penting artinya bagi kelanjutan eksistensi manusia. Hal ini dapat dilihat bahwa wilayah pesisir dan lautan Indonesia mengandung sumber daya alam yang berlimpah.

Ekosistem pesisir juga mempunyai potensi untuk dikembangkan sebagai daerah pelayaran dan pelabuhan, industri, agribisnis, pariwisata. Dengan melihat potensi tersebut maka diharapkan pengembangan dan pemanfaatan ruang pesisir beserta keragaman ekosistemnya harus tetap mempertimbangkan kelestarian fungsi dan tatanan lingkungan di wilayah pesisir.

Kota Ternate merupakan kota kepulauan dengan perkembangan aktivitas kota dan masyarakatnya berlangsung di sepanjang wilayah pesisir. Sebagai salah satu kota pulau, maka misi pembangunan wilayah adalah menjadikan Kota Ternate sebagai kota pantai. Pembangunan Kota Ternate diarahkan pada upaya meningkatkan dan mengembangkan Kota Ternate dalam suatu sistem wilayah kepulauan melalui penyediaan dan peningkatan infrastruktur yang dapat memberi ciri sebagai kota pantai.

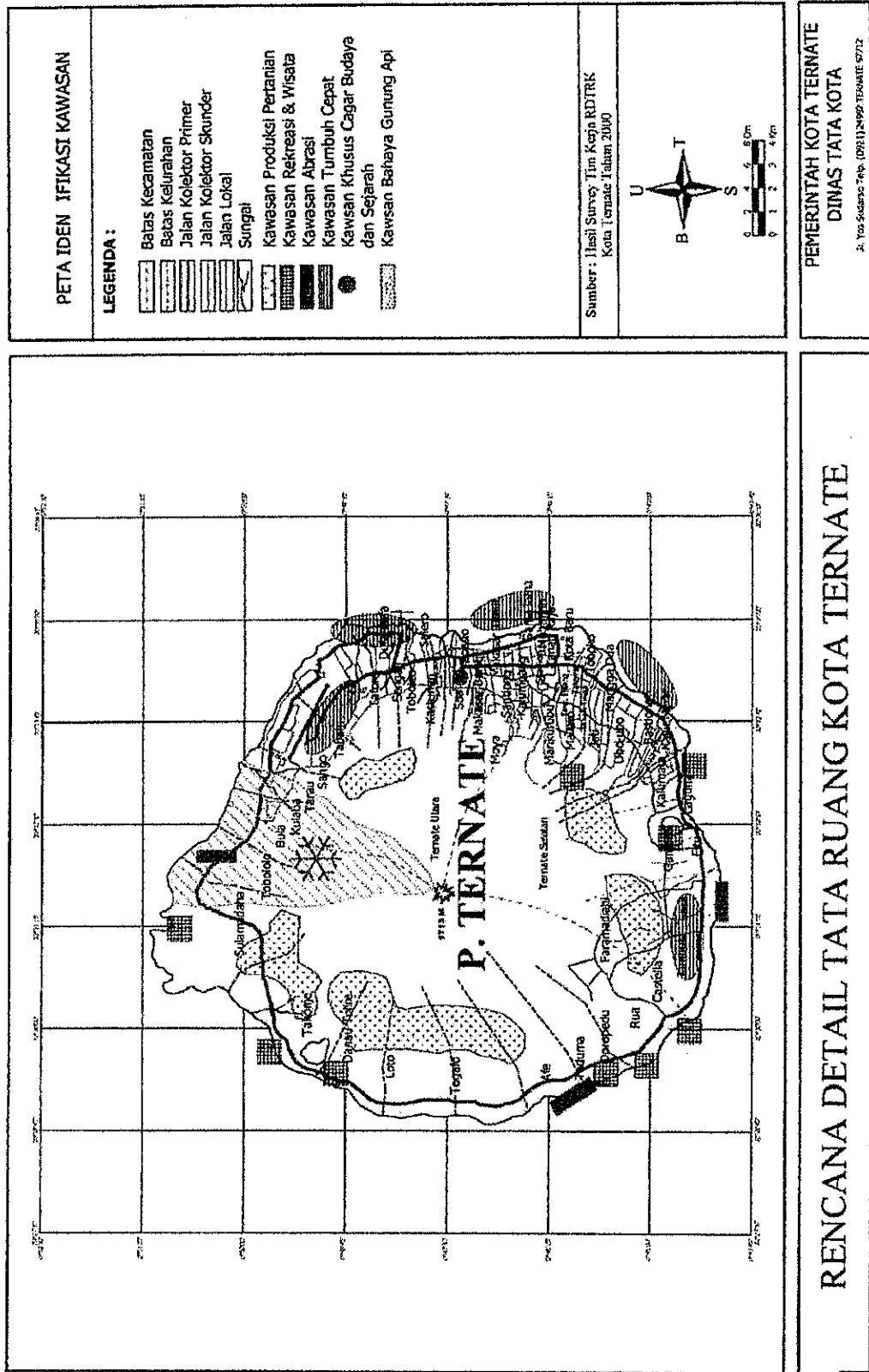
Seiring dengan dinamika perkembangan kota maka kebutuhan ruang untuk permukiman semakin meningkat. Kota Ternate memiliki kondisi topografi yang tidak rata, sehingga menjadikan wilayah pesisir sebagai pilihan utama dalam pemanfaatan ruang. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat tidak sebanding dengan penyiapan prasarana dasar pendukung permukiman. Lambat laun hal ini justru mengakibatkan menurunnya nilai lingkungan pesisir akibat pencemaran.

Kelurahan Makassar Timur adalah salah satu kelurahan yang terletak di kawasan pesisir Kota Ternate. Dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) tahun 2001-2005, wilayah kelurahan Makassar Timur merupakan Bagian Wilayah Kota I (BWK I) yang diperuntukkan untuk kegiatan dengan intensitas tinggi, seperti pusat kota, perdagangan, perkantoran, permukiman, terminal, dan pelabuhan. Salah satu pemanfaatan ruang pesisir yang berkembang adalah fungsi permukiman. Akan tetapi penggunaan ruang pesisir khususya untuk fungsi permukiman tidak diatur dalam RDTRK.

Permukiman penduduk yang ada di wilayah kelurahan Makassar timur terdiri dari permukiman yang berada di darat dan permukiman yang terletak di atas laut. Keberadaan permukiman atas laut yang tidak ditunjang dengan prasarana pendukung permukiman yang memadai justru dapat menimbulkan pencemaran.

Kepadatan penduduk di permukiman atas laut cukup tinggi yaitu 534 jiwa/Ha . Umumnya penduduk yang tinggal di permukiman tersebut terdiri dari penduduk asli Ternate dan warga pendatang dari pulau Halmahera dan pulau Sulawesi yang sudah menetap lebih dari dua puluh tahun lamanya. Rata-rata penduduk memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta. Permukiman atas laut tidak saja dimanfaatkan sebagai tempat tinggal tetapi oleh sebagian penduduk juga dijadikan tempat usaha.

Tidak tersedianya fasilitas lingkungan permukiman yang memadai, memberi pengaruh pada perilaku masyarakat untuk cenderung membuang sampah yang berasal rumah tangga dan kegiatan usaha langsung ke laut, sehingga menjadikan lingkungan pesisir dengan peruntukkan tempat tinggal menjadi kotor, kumuh dan tidak sehat. Hal tersebut merupakan akibat dari tidak adanya aturan tentang pemanfaatan ruang pesisir khususnya untuk permukiman sehingga yang terjadi permukiman di atas laut tumbuh alami tanpa ada pengendalian dari awal. Fungsi tata ruang yang semestinya mengatur penggunaan dan pemanfaatan ruang khususnya kawasan pesisir, sehingga dapat menjadi pedoman bagi arah pembangunan di Kota Ternate.



Gambar 1.1. Peta Kota ternate
 (Sumber: BAPPEDA Kota Ternate Tahun 2001)

1.2. Perumusan Masalah

Kota Ternate adalah salah satu Kota kepulauan dengan luas wilayah 249,75 Km² yang seluruh wilayahnya dikelilingi oleh laut serta terdiri dari 18 kelurahan pantai dan 14 Kelurahan bukan pantai. Kelurahan Makassar Timur adalah salah satu dari kelurahan pantai. Dalam RDTRK tahun 2001-2005, kelurahan Makassar Timur termasuk Bagian Wilayah Kota I yang diperuntukkan untuk kegiatan intensitas tinggi seperti, pusat kota, perdagangan, perkantoran, pemukiman, terminal dan pelabuhan.

Bahasan dalam penelitian ini adalah keberadaan permukiman penduduk atas laut sebagai salah satu bentuk pemanfaatan ruang di kelurahan ini, ternyata membawa dampak terhadap lingkungan pesisir karena perilaku masyarakat penduduk setempat menjadikan laut sebagai tempat pembuangan sampah dari kegiatan aktivitas keseharian.

Berdasarkan latar belakang, maka kondisi yang menjadi pertanyaan penelitian adalah :

1. Bagaimana kesesuaian peruntukan ruang pesisir di kelurahan Makassar Timur yang diatur dalam RDTRK.
2. Bagaimana kondisi prasarana permukiman atas laut dan sanitasi lingkungan pesisir kelurahan Makassar Timur Kota Ternate.

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dampak pemanfaatan ruang pesisir sebagai kawasan permukiman di atas laut di kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate.
2. Untuk mengetahui tingkat partisipasi masyarakat dalam mengelola lingkungan pesisir di kelurahan Makassar Timur, Kota Ternate.
3. Untuk mendapatkan konsep penataan kawasan fungsi permukiman atas laut yang ideal dengan memperhatikan kelestarian lingkungan pesisir.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi pedoman arahan pemanfaatan ruang khususnya pengembangan wilayah pesisir sebagai daerah permukiman.
2. Diharapkan hasil penelitian dapat menjadi bahan masukan untuk menciptakan penataan kawasan permukiman atas laut yang lebih sehat dengan mengutamakan konsep keberlanjutan lingkungan.

1.5. Lingkup Penelitian

Lingkup bahasan penelitian adalah tentang keberadaan kawasan permukiman atas laut serta dampaknya terhadap lingkungan pesisir sebagai akibat dari perilaku masyarakat dalam membuang sampah setempat dan faktor ketersediaan prasarana dasar permukiman. Dengan pendekatan partisipasi dapat diketahui tingkat keterlibatan masyarakat dalam menjaga lingkungan pesisir sebagai bagian dari tempat bermukim. Sebagai hasil akhir penelitian diperoleh konsep untuk penataan pada kawasan permukiman tersebut.

1.6. Keaslian Penelitian

Penelitian pengelolaan wilayah pesisir pernah dikaji sebelumnya oleh Hartono Iriyanto tahun 2002 tentang “Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Wilayah Pesisir Kecamatan Bonang, Kabupaten Demak” yang ditekankan pada pemanfaatan dan konfigurasi ruang. Materi partisipasi masyarakat dalam penataan kawasan telah dibahas pada penelitian oleh Murtanti Jani Rahayu tahun 2001 tentang “Pengaruh Peremajaan Partisipatif Terhadap Perubahan Kondisi Masyarakat dan Lingkungan” (Studi kasus Bantaran Kali Anyar Mojosoongo Surakarta). Sedangkan materi tentang pemilihan lokasi permukiman telah dibahas oleh Moch. Ariefin tentang “Pengaruh kondisi Sosial Ekonomi Penduduk Pendetang terhadap Pemilihan Lokasi Permukiman di Daerah Banjir Kecamatan Gayam Sari Kota Semarang”.

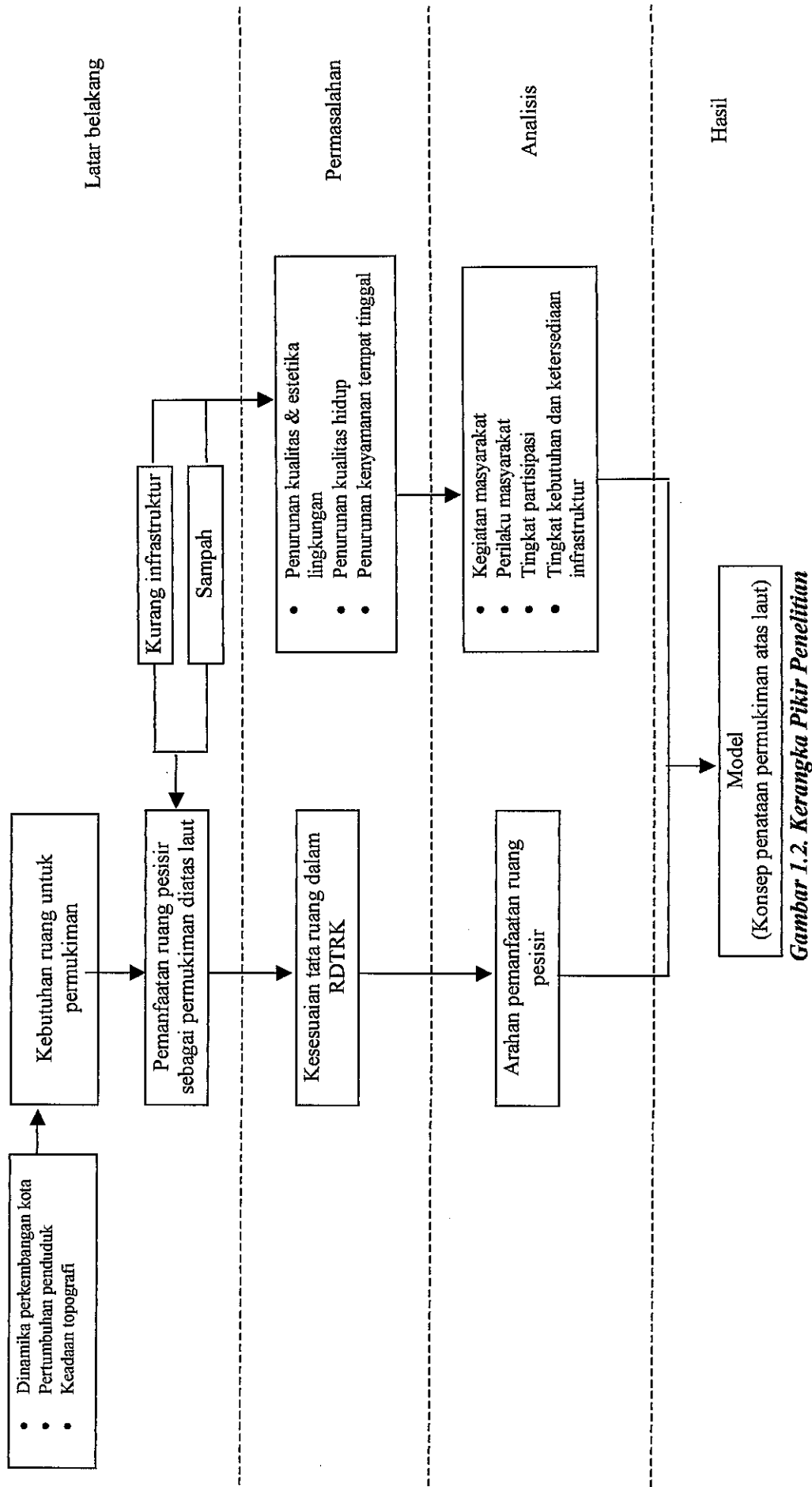
Secara tegas dapat dinyatakan bahwa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berbeda dengan penelitian ini, antara lain (i) Objek penelitian, pada permukiman penduduk di atas laut dan (ii) Lokasi penelitian di kelurahan Makassar Timur Kota Ternate Propinsi Maluku Utara.

1.7.Kerangka Pikir Penelitian

Kota Ternate adalah kota pulau dengan dinamika perkembangan kota berlangsung di sepanjang pesisir. Pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi maka kebutuhan akan ruang semakin meningkat. Kondisi topografi Kota Ternate yang tidak rata menjadikan wilayah pesisir menjadi pilihan utama. Salah satu bentuk pemanfaatan ruang pesisir adalah sebagai fungsi permukiman. Permukiman yang ada di pesisir kelurahan Makassar Timur adalah permukiman atas laut. Perkembangan permukiman ini tidak disertai dengan memadainya prasarana dasar permukiman, akibatnya sampah yang berasal dari aktivitas penduduk setempat dibuang langsung ke laut dan mencemari wilayah pesisir.

Berdasarkan RDTRK tahun 2001-2005 bahwa wilayah ini termasuk BWK I dengan peruntukan kegiatan intensitas tinggi, salah satunya tentang permukiman. Namun arahan pengaturan secara detail tentang penggunaan ruang pesisir khususnya permukiman atas laut belum diatur. Kondisi permasalahan ini kemudian membawa dampak penurunan kualitas lingkungan yang berpengaruh kepada penurunan kualitas hidup dan kenyamanan tempat tinggal. Dengan pendekatan partisipasi masyarakat dan pemenuhan infrastruktur diharapkan mendapatkan konsep penataan permukiman tersebut.

1.7. Kerangka Pikir



Gambar 1.2. Kerangka Pikir Penelitian

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Perencanaan Pengelolaan Wilayah Pesisir

2.1.1. Pengertian

Perencanaan merupakan bagian dari pengelolaan (Rutveid, 1980) mengemukakan bahwa Perencanaan adalah proses penyampaian sekumpulan keputusan untuk melakukan tindakan pada masa depan diarahkan untuk mencapai sasaran dengan cara-cara yang disukai. Selanjutnya dikatakan pengelolaan secara singkat merupakan usaha manusia untuk menata suatu sistem tertentu.

Wilayah pesisir memiliki potensi dan kendala alami tertentu dan dalam pemanfaatannya oleh manusia di wilayah itu terdapat berbagai permasalahan yang menyamai komponen-komponen yang berupa lahan, sumber daya alam, lingkungan binaan atau buatan dan manusianya yang ada, tinggal atau memanfaatkannya. Oleh karena itu perlu disusun peraturan-peraturan konsepsional, pedoman-pedoman dan petunjuk teknis wilayah pesisir untuk mengatasi wilayah tersebut. Pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu dapat dikatakan merupakan suatu pendekatan pengelolaan wilayah pesisir yang melibatkan dua atau lebih ekosistem, sumberdaya dan kegiatan pemanfaatan untuk pembangunan secara terpadu (*integrated*) guna mencapai pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan (Meta, 1975 dalam Rokhim, 1996). Dalam konteks ini, keterpaduan (*integration*) mengandung tiga dimensi keterpaduan, yaitu : sektoral, bidang ilmu dan keterkaitan ekologis.

Selanjutnya dikatakan bahwa keterpaduan secara sektoral berarti bahwa perlu ada koordinasi tugas, wewenang dan tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintahan tertentu (*horizontal integration*) dan antar pemerintah dari mulai tingkat desa, kecamatan, kabupaten, propinsi sampai tingkat pusat (*vertical integration*).

Keterpaduan dari sudut pandang keilmuan mensyaratkan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin (*interdisciplinary approaches*), yang melibatkan bidang ilmu : ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum dan lainnya yang relevan. Ini wajar karena wilayah pesisir pada dasarnya terdiri dari sistem alam dan sistem sosial terjalin secara kompleks dan dinamis.

Sudah diketahui secara luas bahwa wilayah pesisir dimanfaatkan oleh banyak pihak atau sektor. Selain itu beberapa sektor tertentu juga menguasai wilayah lebih luas dibandingkan dengan sektor yang lain meskipun penetapannya kebanyakan tidak didukung atas dasar kesesuaian lahan. Beberapa wilayah juga sudah dialokasikan untuk pengembangan suatu sektor

tertentu, misalnya untuk pariwisata, perhubungan laut (pelabuhan), pembangkit tenaga listrik atau industri tertentu. Dalam hal demikian maka tidak diberlakukan cara keterpaduan semua sektor namun hanya beberapa sektor terkait.

Pada hakekatnya lahan pantai merupakan milik umum (*common property*). Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang dan Keputusan Presiden nomor 24 tahun 1990 tentang Kawasan Lindung. Untuk wilayah yang dikembangkan menjadi milik umum maka pengelolaan perlu dilakukan secara terpadu (*integrated*), menyeluruh untuk semua sektor. Dalam hal sebagian besar lahan masih menjadi milik rakyat juga dilakukan pendekatan dengan berbagai kalangan khususnya dengan pemilik lahan. Demikian pula halnya dengan milik organisasi atau sektor tertentu yang akan dirubah sesuai dengan perencanaan yang baru (Rina, 2000).

Menurut Undang-Undang tentang Penataan Ruang tersebut dikenal beberapa wilayah yang khusus, baik yang berupa kawasan lindung yang harus dikonservasi secara penuh atau terbatas, maupun yang memiliki otoritas tertentu dalam bentuk kawasan seperti Pulau Batam. Dengan demikian dapat dirinci pokok-pokok mengenai tujuan, sasaran, fungsi, manfaat (guna), kepentingan dan keperluan dari pengelolaan wilayah pesisir sebagai diberikan berikut ini.

Menurut Dahuri (1996), pada dasarnya terdapat tiga langkah utama dalam perencanaan pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu, dimana ketiga langkah utama ini merupakan satu keterkaitan perencanaan pengelolaan yang tidak dapat dibuat secara terpisah yang akan berakibat pada tidak sejalanannya pola pemikiran yang telah digariskan. Ketiga langkah tersebut yaitu : (1) perencanaan, (2) implementasi, dan (3) pemantauan. Kegiatan, waktu (jadwal) dan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan setiap kegiatan, pelaksanaan kegiatan serta cara pelaksanaan kegiatan.

2.1.2 Kegunaan

Pembangunan suatu wilayah pesisir dapat berkelanjutan, secara garis besar wilayah perlu dipilah menjadi 3 mintakat (*zones*), yaitu : (1) mintakat reservasi, (2) mintakat konservasi dan (3) mintakat pemanfaatan. Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Tata Ruang, mintakat (1) dan (2) dinamakan sebagai kawasan lindung, sedangkan mintakat (3) sebagai kawasan budidaya. Dari pernyataan tersebut, proses penyusunan tata ruang pesisir dapat dilakukan dengan cara membuat penampalan atau menumpangtindihkan (*overlay*) peta-peta tematik yang memuat karakteristik biofisik (ekologis) wilayah pesisir terhadap peta-peta yang memuat persyaratan biofisik dari setiap kegiatan pembangunan yang direncanakan, dan peta penggunaan ruang (lahan) pesisir saat ini.

Setelah berhasil menempatkan setiap kegiatan pembangunan pada lokasi yang secara ekologis sesuai (*sustainable*) sesuai tata ruang, maka pada perencanaan berikutnya adalah menentukan tingkat (laju) optimal dari setiap kegiatan pembangunan atau suatu besaran atau intensitas pembangunan yang secara sosial-ekonomi menguntungkan dan secara ekologis aman dan atau segenap lingkungan negatif yang ditimbulkannya masih dapat ditenggang oleh ekosistem alam. Penempatan tingkat pembangunan yang optimal dapat dilakukan dengan cara membuat analisis optimal antara permintaan (*demand*) dan sumberdaya, ruang serta jasa-jasa lingkungan pesisir lainnya dan kemampuan wilayah pesisir dalam menyediakan secara berkesinambungan.

Perencanaan tata ruang merupakan perumusan penggunaan ruang secara optimal dengan orientasi produksi dan konservasi bagi kelestarian lingkungan serta mengarahkan dan mengatur alokasi pemanfaatan ruang, mengatur alokasi kegiatan, keterkaitan antar fungsi kegiatan serta indikasi program dan kegiatan pembangunan.

Perencanaan penggunaan lahan merupakan kegiatan seleksi sebaran lahan untuk tujuan spesifik, dengan memadukan hal-hal : informasi kesesuaian lahan, permintaan akan alternatif produk dan penggunaan, kesempatan perluasan dengan ketersediaan lahan dan dalam sistem kelembagaan yang ada (Pirzan, 2000). Perencanaan tata guna lahan dengan demikian dimulai dari kegiatan evaluasi lahan yang mengidentifikasi karakteristik lahan dan menilainya untuk keperluan tipe wilayah tertentu : penyusunan spasial menurut wilayah tertentu, juga akan meliputi perencanaan pemusatan kegiatan tertentu serta pusat-pusat wilayah dari suatu kegiatan dan juga akan meliputi pengelompokan wilayah tertentu untuk kelompok tujuan yang digariskan. (Branch, 1998). Instrumen dalam perencanaan wilayah secara umum adalah : standarisasi, formulasi preskripsi, penyediaan infrastruktur, instrumen harga, serta penetapan lokasi. (Rietvied, 1980). Aspek lain juga berpengaruh seperti : aspek legal, kebijakan, pendekatan negara donor, minat investasi serta proyeksi lingkungan. Penataan ruang wilayah adalah pengaturan penggunaan lahan kedalam unit-unit yang homogen ditinjau dari keseragaman fisik, non fisik, sosial, budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan.

Penataan ruang dimaksudkan untuk membenahi penggunaan lahan yang sedang berjalan dengan tujuan meningkatkan efisiensi sehingga keluaran yang diharapkan adalah yang terbaik dalam dimensi kurun waktu dan ruang tertentu. Dengan demikian secara transparan dalam peta skala tertentu, sesuai menurut kepentingannya dapat dilihat zonasi lahan menurut peruntukannya, antara Lain kehutanan, pertambakan, pemukiman, kawasan industri, pertanian, perkebunan, peternakan, kawasan wisata atau kawasan fasilitas umum. Untuk konteks yang demikian, dapat pula diartikan sebagai penatagunaan sumber alam (Haeruman, 1996). Penataan ruang atau lokasi

pemanfaatan ruang dapat dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, yaitu : melalui peraturan perundangan, melalui mekanisme pasar dan kombinasi keduanya (Hardjowigeno dan Nasution, 1990).

2.1.3. Aplikasi

Tahap selanjutnya adalah implementasi dari rencana yang telah disusun. Esensi dari tahap implementasi adalah pelaksanaan segenap bsilitas kegiatan (proyek) sesuai rencana dengan cara membuat pembagian tugas yang transparan dan diterima pelaksanaannya.

Kebutuhan data dan informasi bagi perencanaan pengelolaan wilayah pesisir menurut Rais (1996), hendaknya disesuaikan dengan kebutuhan penggunaannya (*user's need*), yaitu :

- 1) Dimensi ekologis, agar pembangunan wilayah pesisir dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka harus memenuhi tiga persyaratan utama. Pertama, bahwa setiap kegiatan pembangunan hendaknya ditempatkan di lokasi yang secara biofisik (ekologis) sesuai dengan persyaratan dari kegiatan pembangunan tersebut. Kedua, bahwa laju pembuangan limbah ke dalam wilayah pesisir hendaknya tidak melebihi kapasitas asimilasi wilayah tersebut dan ketiga, bahwa laju (tingkat) pemanfaatan sumber daya alam wilayah pesisir, khususnya yang dapat pulih, hendaknya tidak melampaui kemampuan pulih (potensi lestarnya) dalam kurun waktu tertentu atau pemanfaatan sumberdaya secara optimal.
- 2) Dimensi sosial-ekonomi-budaya, mensyaratkan bahwa laju pembangunan hendaknya dirancang sedemikian rupa, sehingga permintaan total atas sumberdaya alam dan jasa-jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir tidak melebihi kemampuan ekosistem pesisir untuk menyediakan.
- 3) Dimensi sosial-politik, mensyaratkan bahwa perlu diciptakan suasana yang kondusif bagi segenap lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sumberdaya wilayah pesisir.
- 4) Dimensi hukum dan kelembagaan, mensyaratkan perlunya sistem dan kinerja dan kelembagaan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan sumberdaya wilayah pesisir secara berkelanjutan.

Perencanaan pengelolaan wilayah pesisir merupakan pemanfaatan sumberdaya ruang pesisir oleh pemerintah untuk memenuhi tujuan tertentu, seperti perikanan tangkap, tambak, pariwisata, pelabuhan atau industri, diharapkan dengan perencanaan pengelolaan wilayah pesisir yang baik dengan melibatkan masyarakat tidak menimbulkan konflik kepentingan antar sektor

yang berkepentingan yang melakukan aktivitasnya pembangunan pada wilayah pesisir (Soekidjo, 1998).

Perencanaan terpadu dimaksudkan untuk mengkoordinasikan dan mengarahkan berbagai aktivitas dari dua atau lebih sektor dalam perencanaan pembangunan dalam kaitannya dengan pengelolaan, wilayah pesisir. Perencanaan terpadu biasanya dimaksudkan sebagai suatu upaya secara terprogram untuk mencapai tujuan dan mengoptimalkan antara kepentingan untuk memelihara lingkungan. Keterlibatan masyarakat ekonomi, seringkali keterpaduan juga diartikan sebagai koordinasi antara tahapan pembangunan di wilayah pesisir yang meliputi : pengumpulan dan analisis data, perencanaan implementasi dan kegiatan konstruksi (Sorensen dan Mc Greary, 1990 dalam Rakhim Dahuri, 1996).

2.2. Sifat Penataan Ruang Kelautan dan Pesisir.

Sejalan dengan asas-asas tersebut di atas, undang-undang penataan ruang menegaskan bahwa penataan ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketentuan ini sejalan konsep wawasan nusantara yang melihat darat, laut dan udara sebagai satu kesatuan wilayah. Laut bukanlah faktor pemisah, melainkan penghubung antara satu dan lain daerah.

Tanpa bermaksud mengurangi hal tersebut, tetapi karena pada kenyataannya ruang lautan memiliki sifat khusus baik secara teknis maupun yuridis dimana pantai memiliki karakteristik alamiah yang berbeda dengan daratan sehingga memerlukan penanganan yang spesifik. Sedangkan secara pridis didasarkan pada kenyataan bahwa pada ruang lautan melekat hak-hak internasional yang harus dihormati baik berdasarkan hukum internasional maupun hukum nasional. Dengan kata lain subjek hukum yang berkaitan dengan hukum lautan nasional meliputi subjek hukum yang diakui menurut hukum internasional. Jika di ruang daratan status hukum merupakan salah satu faktor yang diperhitungkan dalam menetapkan peruntukkan dan penggunaan tanah, maka status hukum yang berbeda antara perairan pedalaman, perairan nusantara, merupakan faktor-faktor yang harus diperhitungkan dalam penataan ruang lautan.

Pengembangan dan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir, dapat dikatakan lebih rumit, mengingat keunikan potensi sumber daya alam, batas-batas, dan pengelolaan administrasi dan yuridisnya, serta kawasan pesisir sebagai tempat bertemunya ruang daratan dan lautan.

Selain itu, tingkat tekanan kawasan pesisir di Indonesia datang dari dua arah, yaitu dari aktivitas di kawasan perarian sekitar lokasi tersebut serta aktivitas di daratan. Oleh karena itu penataan ruang dan pendekatan teknik pengembangan kawasan pesisir bersifat *multi-disipliner*, *cross-sectoral* dan terpadu, mengingat hasil pemanfaatannya yang *multi-use*. Selain itu,

diperlukan pertimbangan yang hati-hati dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut pengembangan kawasan pantai, karena keunikan masalah yang mencakup dua ekosistem yang berbeda. (Emil, S. 1993) dan (John, A.L. 1999). Penataan ruang berasaskan pemanfaatan ruang bagi semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang serta berkelanjutan. Selain itu, penataan ruang berasaskan keterbukaan, persamaan, keadilan dan perlindungan hukum.

Penataan ruang bertujuan untuk menyelenggarakan pemanfaatan lingkungan yang berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya. Secara spesifik, tujuan penataan ruang adalah tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas untuk :

- Mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas, berbudi luhur dan sejahtera;
- Mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumberdaya alam dan sumberdaya buatan dengan memperhatikan sumberdaya manusia;
- Meningkatkan pemanfaatan sumberdaya alam dan buatan secara berdaya guna, berhasil guna dan tepat guna untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia;
- Mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan mencegah serta menanggulangi dampak negatif terhadap lingkungan dan
- Mewujudkan keseimbangan kepentingan kesejahteraan dan keamanan.

John, A.L dalam Hartono Irianto (1999) mengatakan ruang secara umum, merupakan wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, lautan dan ruang udara (termasuk di dalamnya tanah air, udara dan benda lainnya serta daya dan keadaan) sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dengan makhluk hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya. Meskipun ruang tersebut tidak layak dihuni manusia, seperti ruang hampa udara, lapisan di bawah kerak bumi, kawah gunung berapi, tetapi tetap memiliki keterkaitan dan pengaruh bagi kehidupan dan kelangsungan hidup. Nyata bahwa ketersediaan ruang itu sendiri tidak terbatas.

Ruang wilayah negara sebagai sumberdaya alam terdiri atas berbagai ruang wilayah sebagai suatu subsistem, meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan keamanan, dan kelembagaan dengan corak ragam dan daya dukung yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Sub-sistem berdasarkan batasan administrasi membagi wilayah negara Indonesia menjadi:

- Wilayah Nasional
- Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I
- Wilayah Kabupaten / Kotamadya Daerah Tingkat I Sumber daya manusia dan aktivitasnya dalam pemanfaatan sumber daya alam di dalamnya merupakan bagian dari sub-sistem tersebut di atas.

Pengelolaan sub-sistem yang satu berpengaruh pada sub-sistem lainnya. Oleh karena itu keterpaduan merupakan ciri utama strategi pengembangan dan tata ruang. (Rais, 1996) dan Rokhim, 1996). Tata ruang merupakan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Dalam tata ruang, terdapat hierarki dan keterkaitan antar pengguna ruang. Penataan ruang terdiri atas proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Ketiganya merupakan satu kesatuan sistem yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain, dengan mengacu pada asas pembangunan yang berkelanjutan.

Kawasan pesisir merupakan wilayah peralihan antara daratan dan perairan laut. Secara fisiologi didefinisikan sebagai wilayah antara garis pantai hingga ke arah daratan yang masih dipengaruhi pasang surut air laut, dengan lebar yang ditentukan oleh kelandaian (% lereng) pantai dan dasar laut, serta dibentuk oleh endapan lempung hingga pasir yang bersifat lepas, dan kadang materinya berupa kerikil.

Ruang kawasan pesisir merupakan ruang wilayah diantara ruang daratan dengan ruang lautan yang saling berbatasan. Ruang daratan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan daratan termasuk perairan darat dan sisi darat dari garis terendah. Ruang lautan adalah ruang yang terletak di atas dan di bawah permukaan laut dimulai dari sisi laut pada garis laut terendah, termasuk dasar laut dan bagian bumi di bawahnya.

Pengelolaan sumberdaya alam yang beranekaragam, baik di daratan, lautan maupun udara, perlu dilakukan secara terkoordinasi dan terpadu dengan sumber daya manusia dan sumberdaya buatan dalam pola pembangunan berkelanjutan. (Rais, 1997) pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan mengembangkan tata ruang dalam satu kesatuan tata lingkungan yang dinamis serta tetap memelihara kelestarian kemampuan dan daya dukung lingkungan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional.

2.3. Pemilihan Daerah Permukiman

Menurut Undang-Undang nomor 4 Tahun 1992, yang dimaksud dengan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi prasarana dasar lingkungan. Adapun pengertian permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun pedesaan yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan. Sedangkan pengertian rumah berarti bangunan yang berfungsi sebagai hunian atau tempat tinggal dan sarana pembinaan keluarga dalam artian agar menjadi keluarga sehat, sejahtera dan bermoral.

Pemilihan daerah permukiman oleh manusia semula memilih ruang geografis di wilayah-wilayah yang sesuai dengan kebutuhan yang menjamin hidupnya (*habitable*). Manusia memilih tempat-tempat yang cukup air, tanahnya subur, memberikan kemudahan untuk lalu lintas dan angkutan, memberikan kemudahan untuk mencari lapangan kerja, terlindung dari binatang buas dan lain sebagainya. Akibat pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, daerah-daerah yang tidak *habitable*-pun dijadikan rumah atau tempat tinggal.

Fungsi rumah menurut Hayward *dalam* Budiharjo 1994 mengemukakan konsep fungsi rumah yaitu :

- Rumah memberi rasa aman, meliputi keamanan spritual/non fisik maupun fisik.
- Rumah memberi arti hidup, yang maksudnya hubungan manusiawi diwujudkan dengan hubungan bertetangga karena manusia adalah insan sosial sekaligus insan yang ingin menuju kemandiriannya dengan menemukan jati dirinya.
- Rumah sebagai lingkungan pengembangan diri, yang mewadahi segenap dinamika kehidupan penghuninya, menuju ke tingkat kehidupan yang lebih tinggi. Hal ini juga ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas fisik hunian. Mungkin dengan bertambahnya jumlah ruang maupun material dan bentuk bangunannya. Menurut Budiharjo,1984 bahwa peran rumah adalah :
- Rumah sebagai tempat hunian/kegiatan, menampung sebageian besar kegiatan manusia yang dipenuhi dengan ruang-ruang di dalam rumah seirama dengan berkembangnya kegiatan penghuni.
- Rumah sebagai tempat sosialisasi, tempat awal seseorang diperkenalkan kepada norma, adat istiadat dan agama/budaya.

Faktor sosial yang berkenaan dengan pertnukiman penduduk meliputi karakter demografi, struktur dan organisasi sosial, dan relasi sosial diantara penduduk yang menghuni permukiman tersebut, sedangkan faktor ekonomi yang mempengaruhinya yaitu : harga tanah, kemampuan daya beli penduduk setempat, lapangan penghidupan, transportasi dan komunikasi setempat (Sumaatmadja, 1988). Tingkat kesejahteraan sosial penduduk (BPS, 1992), dapat dilihat dari aspek : kependudukan, kesehatan, pendidikan dan perumahannya. Tingkat kesejahteraan berdasarkan aspek kependudukan dapat diketahui dari jumlah dan pertumbuhannya, kepadatan dan urbanisasi, komposisi menurut umur dan jenis kelamin, angka kelahiran dan KB, dan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk yang semakin tinggi atau semakin sering baik yang dilakukan di dalam kota maupun di luar kotamencerminkan semakin tinggi tingkat kesejahteraannya (BPS, 1992).

Aspek kesehatan yang menjadi indikator kesejahteraan rakyat, menurut BPS dijabarkan ke dalam tujuh indikator, meliputi :

- Sarana kesehatan, meliputi rumah sakit, puskesmas, apotek dan posyandu
- Biaya kesehatan jika sakit
- Angka kematian bayi dan balita
- Angka harapan hidup
- Cara pengobatan
- Angka kesakitan
- Jumlahjenis penyakit yang ada di lingkungan masyarakat

Aspek pendidikan meliputi empat indikator yaitu : angka kenal huruf, tingkat pendidikan yang ditamatkan, ketersediaan sarana pendidikan dan kemampuan menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar dalam kehidupan sehari-hari.

Aspek perumahan termasuk di dalamnya adalah lingkungan tempat tinggal. Indikator aspek perumahan dan lingkungan adalah fasilitas dan kualitas rumah, jenis bahan bakar yang digunakan dalam kegiatan hidup sehari-hari, bahan baku lantai, bahan baku dinding dan bahan baku atap rumah. Fasilitas rumah yang dimaksud adalah penerangan/listrik, pengadaan air bersih untuk minum dan kebutuhan lain, tempat mandi dan WC.

Menurut Umar Fachmi Achmadi dalam makalahnya tentang rumah sehat menyebutkan bahwa rumah sehat harus mempunyai indikator :

- Perilaku hidup sehat dari penduduknya. Membuang sampah pada tempatnya, buang hajat di tempatnya, menjaga selokan supaya tidak macet, membersihkan genangan-genangan air.

- Berkenan dengan kondisi fisik rumah yaitu ukuran rumah dan pengaruhnya terhadap kesehatan, lingkungan fisik permukiman, kualitas udara permukiman serta sarana kesehatan lingkungan permukiman.

Kualitas rumah dapat dilihat dari bahan baku pembuatan rumah. Kualitas lingkungan rumah tempat tinggal dapat diketahui dari tata bangunan perumahan, jaringan jalan di dalam lingkungan perumahan dan tingkat kenyamanan hunian rumah di perumahan tersebut (BPS, 1992).

2.4. Partisipasi Masyarakat

Tema partisipasi menjadi paling utama dalam usaha-usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat dan partisipasi memegang peranan penting untuk mencapai dialog sosial yang lebih baik untuk efisiensi ekonomi dan meningkatkan hubungan-hubungan industri. Istilah partisipasi mempunyai arti dan konotasi yang berbeda menurut sistem hubungan (industri) dan budaya bangsa. Sistem partisipasi bervariasi mulai dari arti yang dangkal (di permukaan saja) sampai kepada keterlibatan yang jauh dalam pengambilan keputusan. Sudah banyak dibuktikan bahwa suatu rencana akan dapat dilaksanakan secara efektif apabila semua pihak yang dalam pelaksanaan juga dilibatkan dalam perencanaan, ini adalah partisipasi masyarakat (Soedijanto, 2000). Konsep pembangunan yang bertumpu kepada masyarakat adalah suatu pembangunan yang dalam pelaksanaannya :

- Didasarkan pada kebutuhan, aspirasi dan kemampuan masyarakat.
- Melakukan penggalangan semaksimal mungkin partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam proses pelaksanaannya.
- Masyarakat lebih banyak berperan sehingga peran pemerintah sebagai katalisator, fasilitator, pengaturan dan pengawasan dalam rangka menciptakan iklim pembangunan kondusif.
- Anggota masyarakat dapat diorganisasi menjadi kelompok yang berbentuk paguyuban, komunitas yang saling mengenal dan terikat oleh kepentingan dan tujuan bersama, didudukkan sebagai pendukung pelaku utama tersebut.
- Pembangunan permukiman harus dilihat sebagai bagian dari proses pembangunan suatu individu dan lingkungan yang tidak terputus, akan tetapi berkelanjutan dan dinamis.

Dengan adanya partisipasi maka pemahaman masyarakat terhadap tujuan pembangunan dan komitmen mereka terhadap pembangunan akan dapat ditingkatkan.

Berbagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembangunan, antara lain :

- Keterlibatan mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan dari kegiatan-kegiatan pembangunan.
- Kontribusi masyarakat setempat dalam setiap pekerjaan bangunan yang berbentuk tenaga kuda atau bahan bangunan setempat.
- Berbagai proyek yang dilaksanakan oleh mereka sendiri.
- Konsultasi yang berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan misalnya pekerjaan bangunan irigasi.

Keempat bentuk partisipasi tersebut di atas dapat mewakili partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Adanya konsultasi dengan masyarakat setempat berkaitan dengan pekerjaan-pekerjaan bangunan yang akan dibuat adalah bentuk partisipasi yang paling sederhana. Sedangkan penyelesaian berbagai proyek yang dilaksanakan sendiri oleh mereka adalah bentuk partisipasi yang paling besar.

Di dalam konteks yang lebih luas, partisipasi masyarakat dapat dilihat disemua tahap dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan di tempat mereka, yaitu :

- Identifikasi masalah.
- Menemukan kebutuhan.
- Merumuskan tujuan atau sasaran.
- Menetapkan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran.
- Melaksanakan kegiatan.
- Melakukan monitoring dan evaluasi.

Esensinya adalah bahwa masyarakat harus diberikan kesempatan untuk mengidentifikasi masalah-masalah sendiri, mengatasi masalah sendiri dan belajar dari masalah-masalah tersebut (Hadi Sudharto, 2001).

Bentuk partisipasi juga bermacam-macam mulai dari penyampaian informasi, konsultasi sampai ke negosiasi dan kadang-kadang pengambilan keputusan bersama. Beberapa model partisipasi berdasarkan pemikiran dan pendekatan terhadap persoalan meliputi :

- Partisipasi dilihat dari kesatuan organik (*organic unity of interest*)
- Partisipasi berdasarkan ketentuan dan lembaga yang sudah ada (*statutory*)
- Partisipasi sukarela (*voluntary*)
- Partisipasi manajemen sendiri (*self management*)

Arah utama dari partisipasi masyarakat adalah membantu masyarakat untuk mampu berperan sebagai subyek pembangunan dalam memperbaiki kondisi hidupnya sendiri. Dari partisipasi sendiri digali tema dasar pengembangan masyarakat dalam aspek, yaitu :

- *Self Help* adalah merangsang kesadaran masyarakat akan kemampuannya sendiri untuk menolong diri sendiri.
- *Technical assistance* lebih menekankan pada proses pembimbingan teknis dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sehingga terbentuk pemahaman yang kritis dan analitis tentang lingkungan.
- *Conflict yaitu* adanya perbedaan antara kelompok dalam suatu kondisi tertentu yang diharapkan mampu melahirkan sumber daya individu yang mampu memperjuangkan hak-haknya melalui proses terentang antara negosiasi sampai benturan.

Dalam penyusunan rencana dan penataan ruang, partisipasi masyarakat didorong seperti tercantum dalam pasal 4, 5 dan 6 undang-undang nomor 4 tahun 1992 yang ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah nomor 69 tahun 1996 yang meliputi : pelaksanaan hak dan kewajiban, bentuk dan tata cara peran serta. masyarakat dengan kegiatan sebagai berikut :

- a) Pemberian masukan dalam penentuan arah pengembangan wilayah yang akan dicapai
- b) Identifikasi potensi dan masalah pembangunan
- c) Bantuan merumuskan perencanaan
- d) Pemberian informasi, saran, pertimbangan dalam penyusunan strategi dan struktur pemanfaatan ruang
- e) Pengajuan keberatan terhadap rancangan rencana
- f) Kerjasama. dalam penelitian dan pengembangan
- g) Bantuan tenaga ahli

Undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah atau desentralisasi memberikan tekanan untuk dapat diwujudkan dua hal, yaitu : Memberikan kewenangan yang lebih besar kepada masyarakat setempat untuk mengambil keputusan sehingga keputusan yang diambil akan sesuai dengan kebutuhan mereka.

Meningkatkan tingkat partisipasi lokal di dalam pembangunan. Dengan kata lain, otonomi daerah atau desentralisasi adalah upaya untuk memberikan tekanan akan adanya partisipasi penduduk dalam pembangunan yang diwujudkan dalam keterlibatan mereka dalam seluruh kegiatan dalam proses pembangunan mulai dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan.

Partisipasi tersebut dapat dilihat dalam berbagai bentuk. Seperti sudah dibahas sebelumnya, bahwa desentralisasi bermuara untuk memberdayakan masyarakat setempat melalui peningkatan pengetahuan dan kesadaran mereka agar dapat lebih memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan, mengorganisir mereka dalam bentuk kelompok-kelompok dan memberikan kesempatan kepada mereka untuk ikut mengawasi dana pembangunan.

Oleh karena itu partisipasi masyarakat dalam pembangunan tidak hanya menyangkut keterlibatan mereka dalam perencanaan dan pelaksanaan saja, seperti melakukan identifikasi masalah, menemukan kebutuhan, merumuskan tujuan, menetapkan kegiatan untuk mencapai tujuan dan melaksanakan kegiatan saja, tetapi juga mencakup menggerakkan masyarakat dalam bentuk kelompok-kelompok serta melakukan monitoring dan evaluasi.

BAB III

METODE PENELITIAN

Kajian pemanfaatan ruang pesisir Kota Ternate dengan studi kasus kawasan permukiman atas laut ini dilakukan dengan metode penelitian kualitatif yang meliputi penelitian pendahuluan, pengumpulan dan pengolahan data serta penyusunan tesis.

3.1. Variabel Penelitian

Variabel-variabel yang dipakai pada penelitian ini adalah

1. Adanya dampak terhadap lingkungan dari pemanfaatan ruang pesisir sebagai tempat bermukim.
2. Tingkat ketersediaan infrastruktur yang mendukung fungsi permukiman atas laut tersebut.
3. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang pesisir dan pengelolaan terhadap lingkungan permukiman kawasan pesisir.

3.2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Makasar Timur Kota Ternate. Alasan pemilihan lokasi karena pada lokasi ini tumbuh permukiman di atas laut yang terdapat membawa dampak menurunnya kualitas lingkungan pesisir.

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dari penelitian ini adalah penduduk setempat yang terdaftar secara administratif sebagai penduduk kelurahan yaitu penduduk permukiman atas laut dan penduduk permukiman di darat. Pengumpulan data menggunakan metode Purposive Sampling dengan kriteria :

- Karakteristik mata pencaharian penduduk
- Tingkat pendidikan penduduk
- Lama tinggal penduduk

Jumlah sampel yang dipilih sebagai responden ditentukan berdasarkan Rumus Slovin : $n = N : (1 + N \epsilon^2)$ menjadi $n = 467 \text{ KK} : (1 + 467)(0,15^2)$, sehingga diperoleh $n = 44,34 \approx 50$ orang responden. Responden yang terpilih telah mewakili komposisi dan karakteristik masyarakat di permukiman atas laut, sehingga dapat diketahui persepsi masyarakat yang berbeda-beda terhadap tingkat kesadaran dan bentuk partisipasi dalam masyarakat.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tujuan penelitian maka jenis data yang dibutuhkan adalah data primer dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder dari literatur pustaka dan dokumen tata ruang yang diperoleh dari instansi terkait. Dalam mengumpulkan data juga menggunakan instrumen kuesioner untuk mendapatkan tanggapan responden.

Data-data dari literatur pustaka tentang :

- Perencanaan wilayah pesisir
- Pemilihan daerah permukiman
- Partisipasi masyarakat
- Metodologi penelitian kualitatif

Pengambilan data melalui observasi :

Pelaksanaan penelitian dilakukan dengan pengamatan secara langsung dan akurat dikawasan pesisir yang dijadikan permukiman dengan melihat dampak keberadaanya terhadap kualitas fisik lingkungan pesisir yang dikaitkan dengan perilaku masyarakat. Dalam observasi ini hasil pengamatan diuraikan secara deskriptif berdasarkan temuan di lapangan.

Pengambilan data melalui wawancara :

Pengumpulan data dilakukan pada responden terpilih yang dilakukan secara langsung, untuk memperoleh informasi tentang kondisi dan persepsi dari masyarakat terhadap permasalahan yang sedang diteliti. Wawancara dilakukan secara terstruktur dan mengarah pada penelitian yang dilakukan. Selain dengan masyarakat, wawancara dilakukan pada pihak yang dianggap berkaitan dengan keberadaan permukiman tersebut.

3.5. Teknik Analisis Data

Pengumpulan data yang diperoleh kemudian dianalisis untuk keperluan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan ruang pesisir yang ditelaah melalui :

1. Komponen lingkungan sosial-ekonomi, dengan aspek kajian kependudukan, sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat.
2. komponen lingkungan ruang dan lahan, dengan aspek kajian : arahan tata ruang, penggunaan ruang dan fasilitas lingkungan.

Data yang telah diperoleh sebagai hasil temuan penelitian kemudian diolah dan di analisis dengan metode kualitatif yang diinterpretasikan dengan argumentasi yang logis sehingga diperoleh hasil yang akurat sebagai pembahasan yang disesuaikan dengan kajian penelitian dan tujuan yang ingin dicapai. Tahapan selanjutnya adalah upaya untuk menyimpulkan dan menginterpretasikan analisis data secara benar sesuai dengan metodologi yang digunakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Rona Lingkungan Daerah Penelitian

4.1.1. Kondisi Geografis

Wilayah Kota Ternate terletak antara $0^{\circ} - 2^{\circ}$ Lintang Utara dan berada pada posisi $126^{\circ} - 128^{\circ}$ Bujur Timur, dengan luas wilayah 249, 75 Km². Wilayah Kota Ternate merupakan daerah kepulauan karena wilayahnya terdiri dari delapan buah pulau. Sebagaimana ciri daerah kepulauan, tempat bermukim dan daerah aktifitas kota terletak di daerah pesisir pantai. Kota Ternate memiliki ciri yang sama, terdapat 70% desa/desa/kelurahan pantai dan 30% lainnya merupakan desa/kelurahan bukan pantai. Kelurahan Makassar Timur sebagai lokasi penelitian merupakan salah satu kelurahan pantai yang terletak di pusat kota.

Kelurahan Makassar Timur termasuk dalam wilayah kecamatan Ternate Utara, dengan luas 10 Ha yang memiliki total jumlah penduduk 4561 jiwa atau terdiri dari 899 kepala keluarga (KK), dan dipadati oleh 703 unit rumah pada tahun 2004. Adapun batas-batas wilayah kelurahan Makassar Timur terdiri dari :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kelurahan Soa-sio.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kelurahan Gamalama.
- Sebelah Barat Berbatasan dengan kelurahan Makassar Barat.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Maluku.

Secara fisik kelurahan Makassar Timur terdiri atas wilayah permukiman di daratan dan permukiman di atas laut atau yang biasanya disebut rumah panggung. Wilayah permukiman atas laut secara administratif terdiri dari 3 (tiga) Rukun Tetangga (RT), yaitu RT 001/01, RT 002/01 dan RT 001/02. Luas wilayah permukiman atas laut adalah 4,5 Ha dengan jumlah penduduk 2401 jiwa atau terdiri dari 467 kepala keluarga (KK), yang dipadati oleh 387 unit rumah. Tingkat kepadatan penduduk permukiman atas laut tahun 2004 adalah 534 jiwa / Ha.

Wilayah Makassar Timur sangat berdekatan dengan pusat kota dan fasilitas umum perkotaan seperti pasar, pertokoan, terminal, dan perkantoran. Dengan kondisi yang seperti ini secara langsung menjadi alasan pemilihan tempat tinggal bagi masyarakat setempat yang memiliki mata pencaharian yang sangat beragam dan mempunyai keterkaitan dengan aktivitas kota.

4.1.2. Kondisi Topografi

Secara umum Kota Ternate terdiri dari atas daerah datar dan perbukitan dengan rata-rata sudut kemiringan 0 – 2 % sampai > 40 %. Kelurahan Makassar Timur merupakan Bagian Wilayah Kota I (BWK I) dalam wilayah kota Ternate, yang memiliki kondisi topografi yang relatif datar dengan kemiringan antara 0 – 2 % dan 2 – 15 % dan ketinggian 4 m di atas permukaan laut.

4.1.3. Awal Mula Permukiman Atas Laut

Dari hasil studi literatur, tidak ditemukan referensi yang menceritakan tentang awal mula lingkungan permukiman atas laut di Kota Ternate secara umum dan Kelurahan Makassar Timur secara khusus. Berdasarkan hasil survai dan wawancara terhadap tokoh masyarakat setempat dan para pamong kelurahan didapatkan informasi bahwa permukiman atas laut tersebut telah ada selama lebih dari 40 tahun yang lalu.

Pada mulanya permukiman tersebut tumbuh di sepanjang sisi timur Jl. Yasin Gamsungi yaitu di tepi laut sebagai rumah yang berorientasi pada jalan tersebut dan membelakangi laut. Namun seiring dengan dinamika perkembangan kota dan aktifitas perdagangan yang pelakunya sebagian besar adalah warga pendatang dari Sulawesi (suku Bugis, Makassar, Mandar dan Gorontalo) maka kelompok pendatang ini mulai menggunakan lahan atas laut yang letaknya sangat berdekatan dengan aktifitas perdagangan kota sebagai area tempat bermukim.

Pertumbuhan penduduk kaum pendatang yang berasal dari Sulawesi dan dari luar Kota Ternate tetapi masih dari propinsi Maluku Utara yang terus meningkat, menjadikan semakin banyak lahan di atas laut yang digunakan sebagai tempat bermukim. Berdasarkan survai, jangkauan permukiman atas laut sekarang bahkan telah menjorok ke arah laut sepanjang 250 m dari batas daratan.

Berdasarkan hasil survai dan wawancara dengan masyarakat dan tokoh masyarakat setempat tentang legalitas status kepemilikan lahan permukiman atas laut, hampir 100 % memiliki sertifikat tanah yang dimiliki melalui Program Nasional (PRONA) tahun 1980. Namun informasi dari Dinas Tata Kota diketahui bahwa pembangunan rumah-rumah atas laut tersebut umumnya tidak melalui mekanisme perijinan (IMB).

4.2. Hasil Penelitian

4.2.1. Kesesuaian Keberadaan Permukiman di Atas Laut Menurut RDTRK Kota Ternate

Regulasi daerah yang terkait dengan penggunaan ruang pesisir khusus permukiman dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Ternate masih bersifat umum. Kondisi wilayah sebagai kota pantai dan pertumbuhan permukiman di atas laut yang berkembang di sepanjang pesisir kota Ternate khususnya di kelurahan Makassar Timur belum sepenuhnya tertuang dalam RDTRK yang semestinya dapat menjadi arahan dan kontrol dalam pemanfaatan ruang pesisir.

Dokumen tata ruang yang dimiliki kota Ternate hanya memuat pembagian Bagian Wilayah Kota (BWK) secara umum, dimana kelurahan Makassar Timur termasuk dalam wilayah BWK I yang memiliki pertumbuhan permukiman yang cukup pesat. Wilayah kelurahan ini atau sebagian besar kelurahan lainnya yang ada di kota Ternate umumnya tidak saja memiliki permukiman yang ada di darat, akan tetapi juga berkembang permukiman yang berada di atas laut. Kawasan permukiman padat penduduk yang memiliki permasalahan khusus seperti di kelurahan Makassar Timur, secara fisik berada di atas laut dan pemanfaatannya sebagai fungsi permukiman telah melewati garis sempadan pantai (GSP) sejauh 250 meter ke arah laut. Hal ini sangat bertentangan dengan SK Menteri Lingkungan Hidup tentang batas sempadan pantai dan sungai yang semestinya berjarak 50 sampai 100 meter, namun dalam aplikasinya sangat sulit diterapkan karena lemahnya koordinasi dari instansi terkait.

Dalam Pola Dasar Pembangunan Kota Ternate tahun 2001-2005 disebutkan bahwa strategi penataan ruang Kota Ternate dilakukan dengan memperhatikan karakteristik wilayah sebagai kota pulau atau kota pantai. Sejalan dengan kondisi tersebut maka penataan ruang Kota Ternate dengan mengarah pada penataan ruang kawasan mempertimbangkan keserasian, keselarasan dalam pemanfaatan serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Sehubungan dengan berkembangnya permukiman di atas laut khususnya pada kelurahan Makassar Timur, diperlukan adanya regulasi yang mengatur tentang pemanfaatan ruang pesisir secara khusus dalam regulasi daerah yang kontekstual dengan kondisi lokal Kota Ternate sehingga dapat menjadi arahan dan pengendalian tentang penggunaan ruang pesisir secara jelas. Sesuai dengan kondisi permukiman yang berada di atas laut kelurahan Makassar Timur dan dampak permasalahan yang ditimbulkan akibat keberadaannya, sangat diperlukan adanya arahan kebijakan pemanfaatan kawasan pesisir yang mampu mengakomodasi kondisi tersebut mengarah pada perbaikan dan penataan kawasan permukiman atas laut untuk peningkatan

kualitas hunian dan lingkungan secara lebih baik dengan memperhatikan kualitas pelayanan prasarana dasar permukiman. Hal tersebut menjadi sangat penting untuk terciptanya lingkungan permukiman yang sehat, sehingga dapat meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungan pesisir yang lebih baik, salah satunya dengan pengelolaan sampah.

Peraturan daerah merupakan landasan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang, maka peraturan tersebut semestinya sangat kontekstual dengan kondisi lokal untuk diterapkan. Seperti halnya Kota Ternate sebagai kota pulau seharusnya memiliki arahan penggunaan ruang pesisir yang kontekstual dengan karakteristik wilayah dan masyarakat Kota Ternate.

4.2.2. Kondisi Sosial Ekonomi

Sebagaimana telah disebutkan diatas bahwa wilayah permukiman di atas laut didiami oleh 899 Kepala Keluarga (KK). Berdasarkan data yang didapat dari kantor kelurahan maka tergambar bahwa sebagian besar masyarakat di permukiman atas laut memiliki mata pencaharian sebagai wiraswasta selain jenis pekerjaan lainnya seperti PNS, Polri/TNI, jasa pertukangan, buruh, nelayan dan petani. Sedangkan dari tingkat pendidikan, sebagian masyarakat permukiman di atas laut berpendidikan sampai pada tingkat SLTA.

Untuk lebih jelas lagi, data tersebut dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Komposisi Penduduk berdasarkan Mata Pencaharian dan Tingkat Pendidikan

No.	JENIS PEKERJAAN	TINGKAT PENDIDIKAN				Jumlah
		SD	SMP	SMA	Sarjana	
1	PNS			64	28	92
2	Polri / TNI		7	20		27
3	Karyawan Swasta			64	32	96
4	Wiraswasta	41	69	240	11	361
5	Jasa Pertukangan	30	20	63		113
6	Buruh	19	18	6		43
7	Nelayan	30	19	12		61
8	Petani	9	13	7		29
9	Pensiunan	10		58	9	77
		139 15.46%	146 16.24%	534 59.40%	80 8.90%	899

Sumber : Data Kelurahan Makassar Timur, 2004.

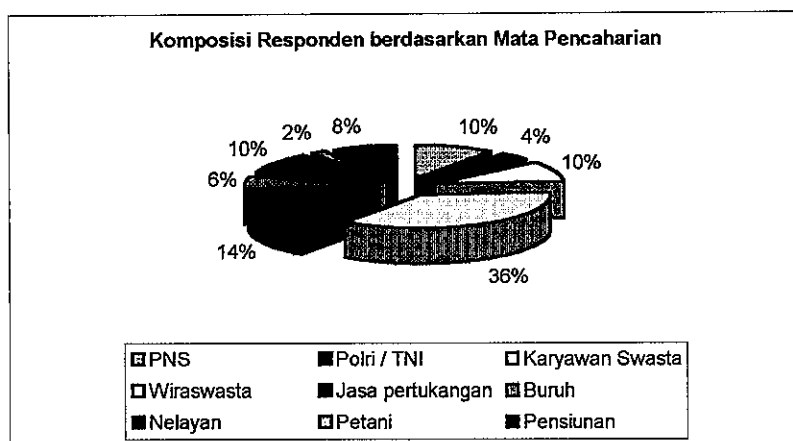
4.2.2.1. Komposisi Responden Berdasarkan Mata Pencaharian

Berdasarkan hasil kuesioner dari responden sejumlah 50 orang, diketahui bahwa responden permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur umumnya memiliki mata pencaharian yang bervariasi antara lain Pegawai Negeri Sipil, Polri/TNI, karyawan swasta, wiraswasta, jasa pertukangan, buruh, nelayan, petani dan pensiunan. Dari survai lapangan diperoleh data bahwa hampir sebagian besar pekerjaan responden yang tinggal di permukiman di atas laut adalah wiraswasta(lihat tabel 2, gambar 4.2).

Tabel 2. Komposisi Responden berdasarkan Mata Pencaharian

No.	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH
1	PNS	5
2	Polri / TNI	2
3	Karyawan Swasta	5
4	Wiraswasta	18
5	Jasa pertukangan	7
6	Buruh	3
7	Nelayan	5
8	Petani	1
9	Pensiunan	4
	Total	50

Sumber : Survai, 2004



Gambar 4.2. Grafik komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian
(Sumber : Survai, 2004)

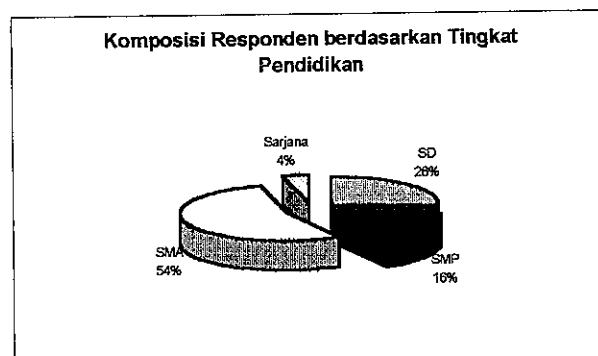
4.2.2.2. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dari data diperoleh rata-rata pendidikan responden cukup bervariasi namun umumnya hampir sebagian besar penduduk yaitu 54 % berpendidikan SMA, selebihnya berpendidikan SD 26 %, SMP 16 % dan responden berpendidikan sarjana 4 %. (lihat gambar 4.3).

Tabel 3. Komposisi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SD	13
2	SMP	8
3	SMA	27
4	Sarjana	2
	<i>Total</i>	50

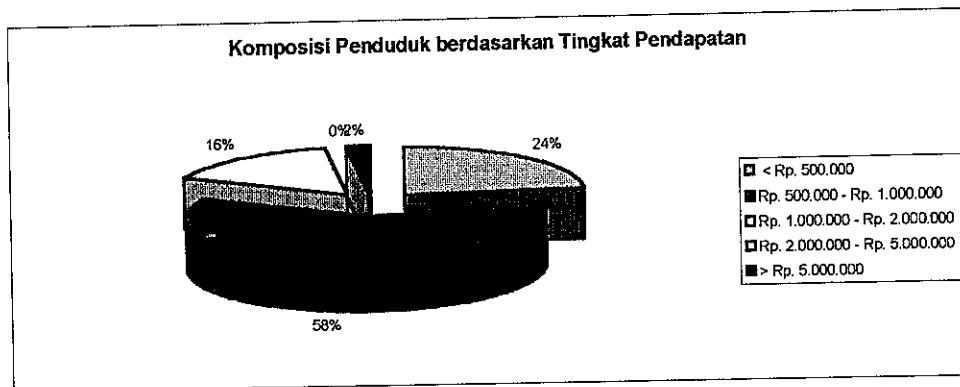
Sumber : Survai, 2004



Gambar 4.3. Grafik komposisi responden berdasarkan pendidikan
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.2.3. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan

Tingkat pendapatan penduduk yang cukup bervariasi sangat dipengaruhi oleh jenis pekerjaan yang berbeda pula. Namun rata-rata pendapatan 58 % responden adalah antara Rp. 500.000 – 1000.000 sedangkan penghasilan 2 % responden yaitu lebih dari Rp. 5.000.000. Para responden tersebut umumnya mempunyai pekerjaan wiraswasta (lihat gambar 4.4. dan tabel 3 lampiran B).



Gambar 4.4. Grafik komposisi responden berdasarkan pendapatan
(Sumber : Survai, 2004)

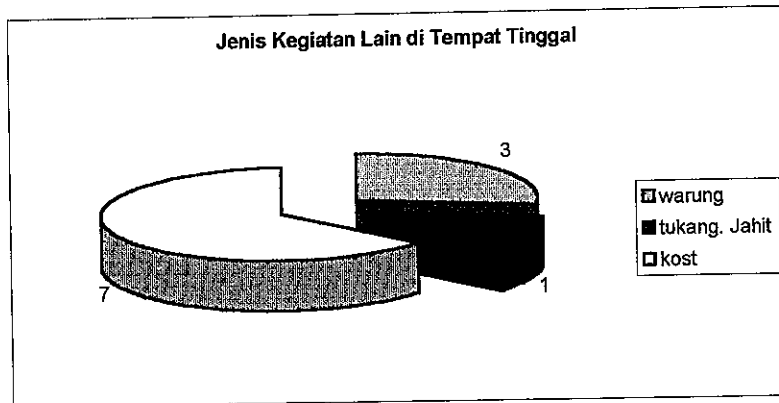
4.2.2.4. Jenis Kegiatan Lain di Tempat Tinggal

Hanya sebagian kecil responden yang mempunyai usaha lain yang berlangsung di rumah selain mata pencaharian utama. Diketahui jenis usaha lain tersebut adalah usaha kontrakan kamar / kost, usaha warung dan usaha jahit. Dari data terdapat 7 orang responden mempunyai usaha kontrakan kamar, 3 orang responden mempunyai usaha warung dan 1 orang mempunyai usaha jasa tukang jahit. (lihat tabel 4, gambar 4.5).

Tabel 4. Jenis Kegiatan Lain di Tempat Tinggal

No.	Jenis Pekerjaan	Jenis Kegiatan lain di tempat tinggal	
		tidak ada	ada
1	PNS	5	
2	Polri / TNI	2	
3	Karyawan Swasta	3	2
4	Wiraswasta	14	4
5	Jasa pertukangan	6	1
6	Buruh	3	
7	Nelayan	4	1
8	Petani	1	
9	Pensiunan	1	3
		39	11

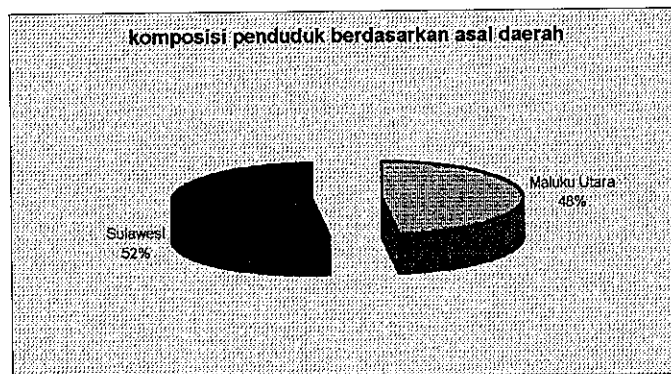
Sumber : Survai, 2004



Gambar 4.5. Grafik komposisi responden berdasarkan pendapatan
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.2.5. Komposisi Responden Berdasarkan Asal Daerah

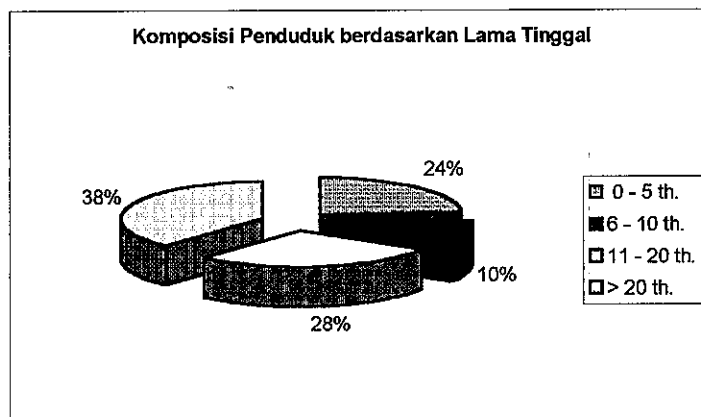
Responden permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur umumnya berasal dari daerah yang berbeda. Sebagian besar penduduk adalah pendatang dari pulau Sulawesi dan sebagian lainnya berasal dari pulau pulau di luar kota Ternate. Secara fisik umumnya penduduk pendatang banyak menempati areal atas laut sedangkan penduduk asli Ternate umumnya menempati wilayah pesisir dan daratan di sepanjang jalan Yasin Gamsungi (lihat gambar 4.6 dan tabel 4 lampiran B).



Gambar 4.6. Grafik komposisi responden berdasarkan asal daerah
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.2.6. Komposisi Penduduk Berdasarkan Lama Tinggal

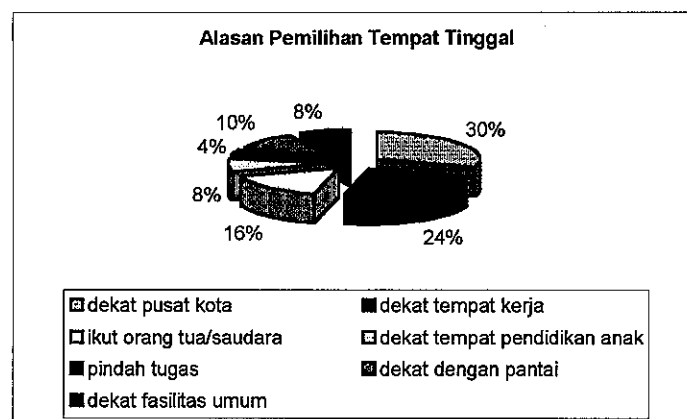
Umumnya responden telah tinggal atau bermukim di permukiman atas laut ini telah cukup lama, yaitu rata-rata penduduk yaitu 38 % banyak yang telah bermukim lebih dari 20 tahun di permukiman tersebut baik penduduk asli maupun pendatang, sedangkan 24 % penduduk yang baru bermukim selama 5 tahun umumnya merupakan penduduk pendatang (lihat gambar 4.7 dan tabel 4 lampiran B).



Gambar 4.7. Grafik komposisi responden berdasarkan lama tinggal
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.2.7. Alasan Pemilihan Tempat Bermukim

Dari hasil kuesioner dan wawancara diketahui alasan utama responden untuk memilih tinggal di permukiman atas laut adalah karena dekat dengan pusat kota sedangkan alasan lainnya yang cukup bervariasi yaitu karena dekat tempat kerja, ikut orang tua/turun-temurun, dekat tempat pendidikan anak, pindah tugas dan dekat dengan pantai (lihat gambar 4.8 dan tabel 6 lampiran B).

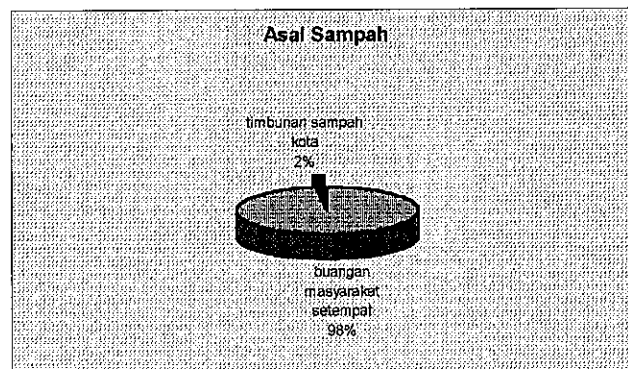


Gambar 4.8. Grafik alasan pemilihan tempat tinggal
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.3. Kondisi Lingkungan Permukiman

4.2.3.1. Sumber Sampah di Lingkungan Permukiman

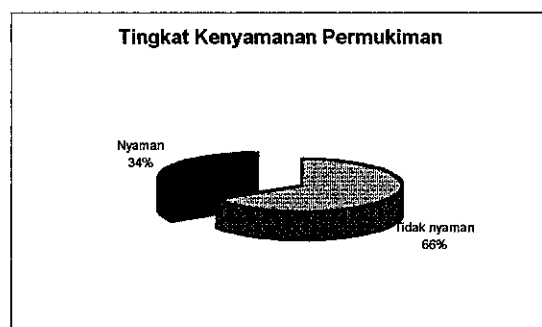
Dari hasil pengamatan dan kuesioner terlihat bahwa sumber sampah yang berada di lingkungan permukiman atas laut 98 % adalah berasal dari buangan masyarakat setempat yang cenderung menjadikan laut sebagai tempat sampah yang mudah dijangkau (lihat gambar 4.9 dan tabel 7 lampiran B).



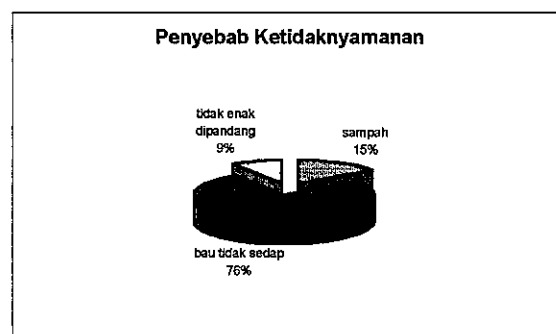
Gambar 4.9. Grafik asal sampah
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.3.2. Tingkat Kenyamanan dan Penyebab Ketidaknyamanan yang Berkaitan dengan Kebersihan Lingkungan

Dari hasil kuesioner diperoleh data, ternyata hampir semua responden mengatakan tidak nyaman dengan kondisi lingkungan yang kotor sedangkan alasan responden sebagai penyebab ketidaknyamanan adalah karena bau yang tidak sedap sebagai akibat dari lingkungan yang kotor oleh sampah dan kotoran manusia yang dibuang langsung ke laut (lihat gambar 4.10 – 4.11 tabel 8 lampiran B).



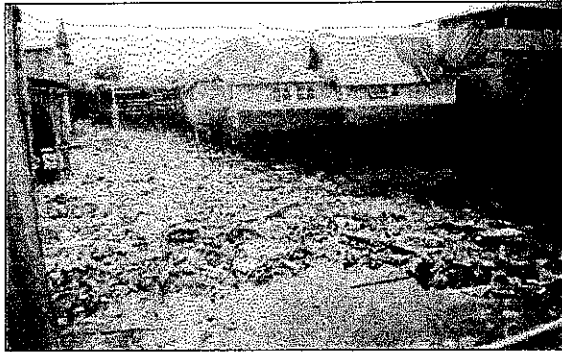
Gambar 4.10. Grafik Tingkat kenyamanan
(Sumber : Survai, 2004)



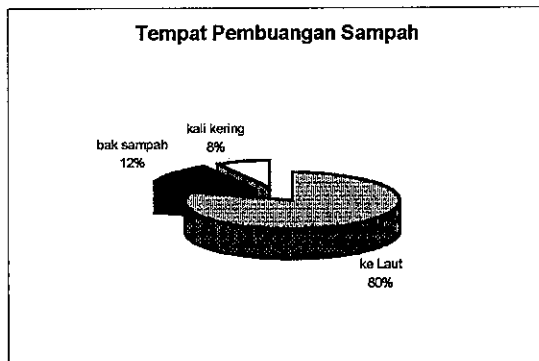
Gambar 4.11. Grafik penyebab ketidaknyamanan
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.3.3. Tempat Akhir Buangan Masyarakat Setempat

Sebagian besar penduduk permukiman atas laut membuang sampah langsung ke laut, dari data diketahui bahwa 80 % responden menjawab membuang sampah rumah tangga langsung ke laut. Hal yang menjadi alasan utama responden karena tidak adanya sarana persampahan dan laut merupakan tempat yang mudah dijangkau oleh masyarakat setempat (lihat gambar 4.12 – 4.13 dan tabel 9 lampiran B).



Gambar 4.12. Kondisi wilayah laut yang dijadikan tempat buangan sampah. (Sumber : Survai, 2004)



Gambar 4.13. Grafik Tempat pembuangan sampah (Sumber : Survai, 2004)

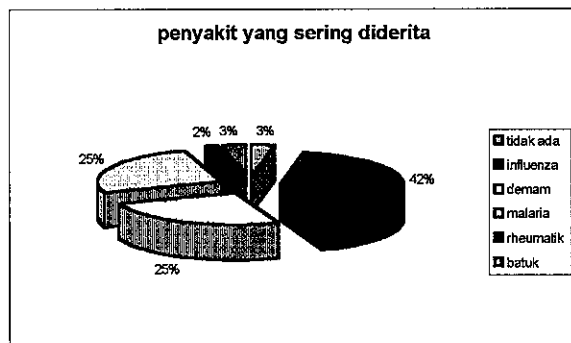
4.2.3.4. Penyakit yang sering diderita dan Tindakan Pengobatan yang dilakukan

Berdasarkan data dari responden, tercatat penyakit yang paling tinggi sering diderita penduduk setempat adalah penyakit pernapasan / influenza sedangkan penyakit lainnya yang juga sering diderita adalah demam, malaria, rheumatik dan batuk. Adapun tindakan pertama pengobatan yang umumnya dilakukan responden adalah beli obat sendiri dan apabila penyakit bertambah parah selanjutnya memerlukan penanganan dokter (lihat tabel 5, gambar 4.14 – 4.15).

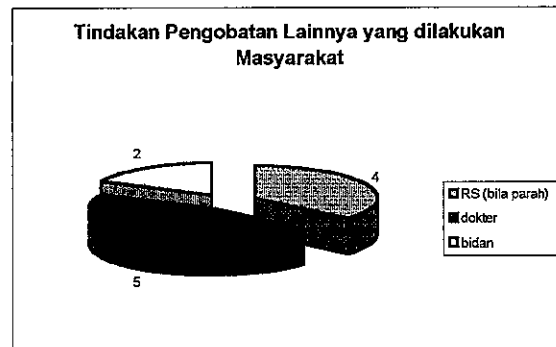
Tabel 5. Penyakit yang sering diderita dan Tindakan Pengobatan yang dilakukan

No.	Jenis Pekerjaan	Penyakit yang sering diderita		Cara Pengobatan		
		tidak ada	ada	beli obat sendiri	ke puskesmas	Lainnya
1	PNS		5	3	1	1
2	Polri / TNI		2	1	1	
3	Karyawan Swasta		5		3	2
4	Wiraswasta	2	16	10	3	5
5	Jasa pertukangan		7	5	1	1
6	Buruh		3		3	
7	Nelayan		5	4	1	
8	Petani		1		1	
9	Pensiunan		4	1	1	2
Total		2	48	24	15	11
persentase		4%	96%	32%	30%	22%

Sumber : Survai, 2004



Gambar 4.14. Grafik penyakit yang diderita masyarakat (Sumber : Survai, 2004)

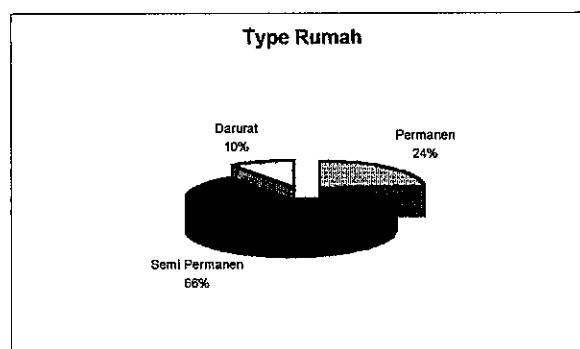


Gambar 4.15. Grafik Tindakan pengobatan oleh masyarakat (Sumber : Survai, 2004)

4.2.4. Kondisi Infrastruktur Permukiman

4.2.4.1. Kondisi Fisik Rumah Penduduk

Secara fisik rata-rata tempat tinggal atau rumah responden permukiman atas laut termasuk kategori semi permanen yaitu rumah dengan tiang-tiang penopang terbuat dari beton tetapi dinding rumah sebagian masih terbuat dari kayu dan papan, data responden tercatat 66% memiliki jenis rumah semi permanen. Rumah 24% responden adalah termasuk kategori permanen yaitu konstruksi rumah secara keseluruhan sudah terbuat dari beton, 10% responden lainnya memiliki rumah dengan tipe darurat yaitu tiang penopang dan keseluruhan dinding rumah terbuat dari kayu dan papan (lihat gambar 4.16).



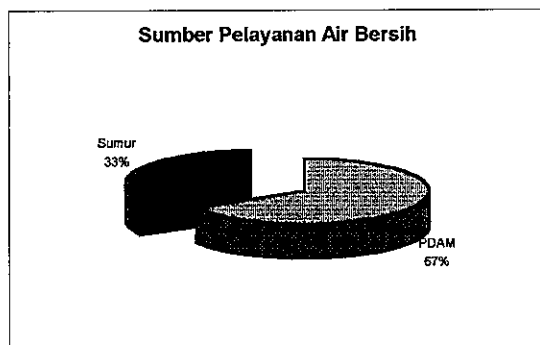
Gambar 4.16. Grafik Tipe Rumah
(Sumber : Survei, 2004)

4.2.4.2. Sumber Pelayanan Air Bersih

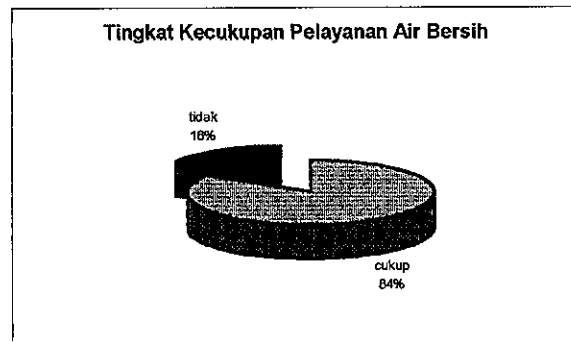
Sumber air yang melayani penduduk permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur umumnya bersumber dari PDAM dan sumur gali. Dari data responden diketahui penduduk yang menggunakan pelayanan PDAM mencapai 67 % sedangkan 33 % lainnya adalah menggunakan sumur gali yang berupa sambungan pipa-pipa yang terpasang di bawah akses jalan yang terhubung langsung ke rumah-rumah penduduk untuk memenuhi kebutuhan air bersih penduduk setempat. Pipa-pipa tersebut terhubung dari sumber air sumur di daratan (lihat gambar 4.17).



Gambar 4.17. Sumur pompa sebagai sumber air bersih yang dimanfaatkan oleh masyarakat
(Sumber : Survai, 2004)



Gambar 4.18. Grafik sumber air bersih
(Sumber : Survai, 2004)



Gambar 4.19. Grafik tingkat pelayanan air bersih
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.4.3. Tingkat Kepuasan Pelayanan Air Bersih

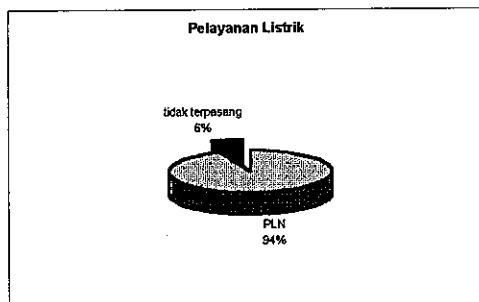
Dari data diketahui bahwa tingkat pelayanan PDAM terhadap kebutuhan air bersih di permukiman atas laut cukup memuaskan bagi sebagian besar responden, meskipun ada sebagian kecil responden yang belum merasa tercukupi dengan pelayanan yang ada karena ternyata dalam seminggu lebih dari 3 (tiga) kali air bersih dari PDAM tidak mengalir (lihat gambar 4.18 – 4.19).

4.2.4.4. Pelayanan Listrik

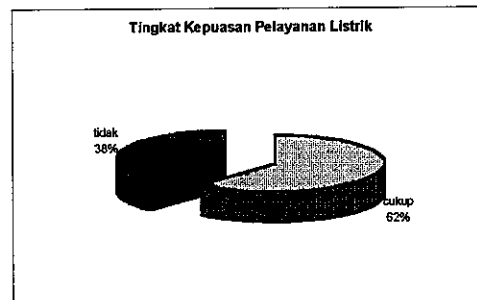
Rata-rata responden di permukiman atas laut menggunakan pelayanan atau penerangan listrik dari PLN, dari data diketahui 94 % responden menggunakan pelayanan dari PLN. Hanya sedikit responden yaitu 6 % saja yang belum terpasang sarana listrik dari PLN (lihat gambar 4.20).

4.2.4.5. Tingkat Kepuasan Pelayanan Listrik

Sebagian besar responden menjawab puas dengan pelayanan listrik yang ada. Sebagian kecil responden tidak merasa puas dengan pelayanan listrik yang ada sekarang dengan alasan bahwa dalam seminggu lebih dari 3 (tiga) kali aliran listrik padam.



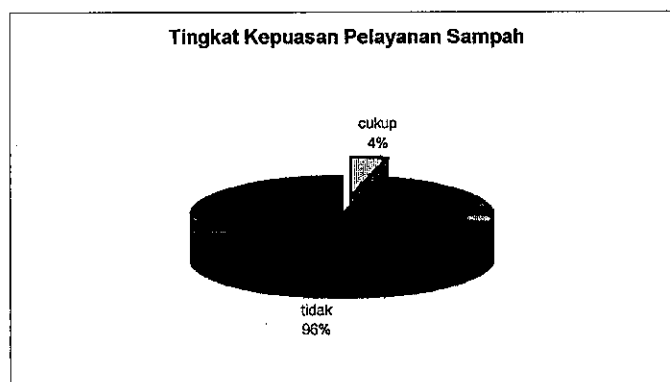
Gambar 4.20. Grafik pelayanan listrik
(Sumber : Survai, 2004)



Gambar 4.21. Grafik tingkat kepuasan pelayanan listrik
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.3.6. Prasarana Sampah dan Tingkat Kepuasan Pelayanan Sampah

Sebagian besar responden yang tinggal di permukiman atas laut menjawab tidak pernah membuang sampah pada tempat sampah, dengan alasan karena tidak adanya sarana persampahan yang tersedia sehingga sebagian besar responden cenderung membuang sampah langsung ke laut. Meskipun demikian ada 96 % responden menyatakan perlu adanya pelayanan sarana persampahan yang perlu ada di lingkungan permukiman tersebut (lihat gambar 4.22).



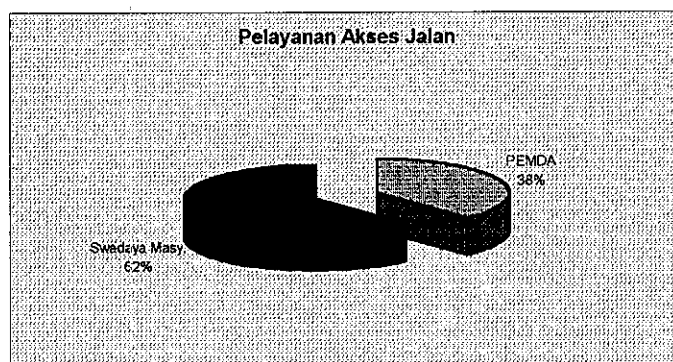
Gambar 4.22. Grafik tingkat kepuasan pelayanan sampah
(Sumber : Survai, 2004)



Gambar 4.23. Kondisi laut yang dijadikan sebagai tempat buangan sampah
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.4.7. Pelayanan Akses Jalan

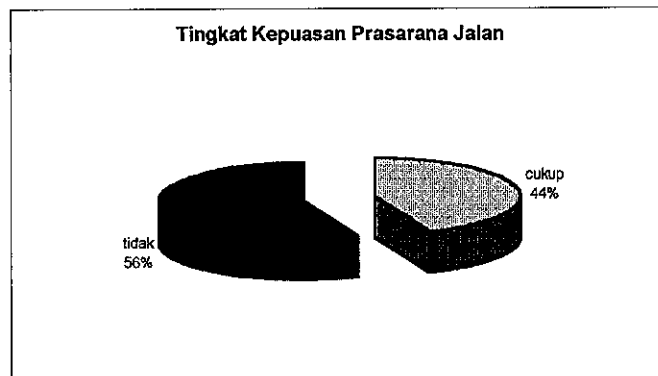
Dari survai lapangan dan data responden diketahui bahwa akses jalan yang ada di permukiman ini, sebagian besar dibangun oleh swadaya masyarakat sendiri dengan konstruksi tidak permanen yang terbuat dari papan sedangkan akses jalan lainnya adalah proyek Pemda yang terbuat dari beton atau permanen (lihat gambar 4.23a dan 4.25)



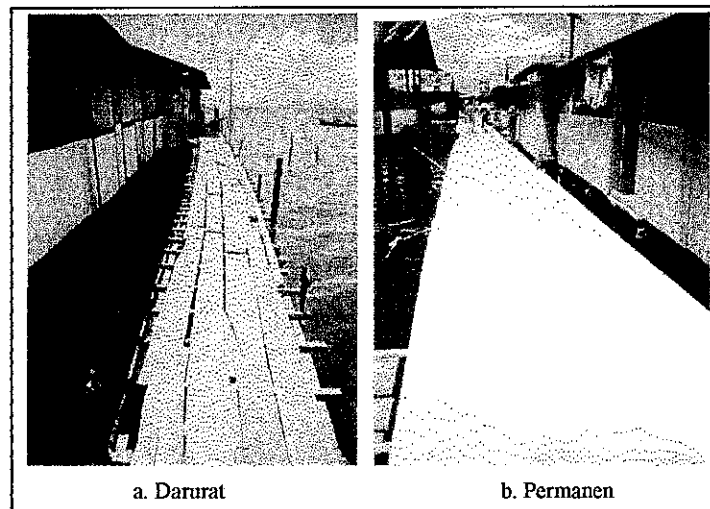
Gambar 4.23a. Grafik pelayanan akses jalan
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.4.8. Tingkat Kepuasan Prasarana Jalan

Berdasarkan pengamatan dan wawancara, sebagian kecil responden menyatakan cukup puas dengan sarana jalan yang ada meski akses jalan tersebut tidak permanen yang dibuat oleh swadaya masyarakat sendiri. Sebagian besar responden lainnya menyatakan tidak puas dengan kondisi jalan yang ada sekarang dan mengharapkan akses jalan yang memadai dengan kondisi jalan lebar dan terbuat dengan konstruksi beton oleh Pemda (gambar 4.24).



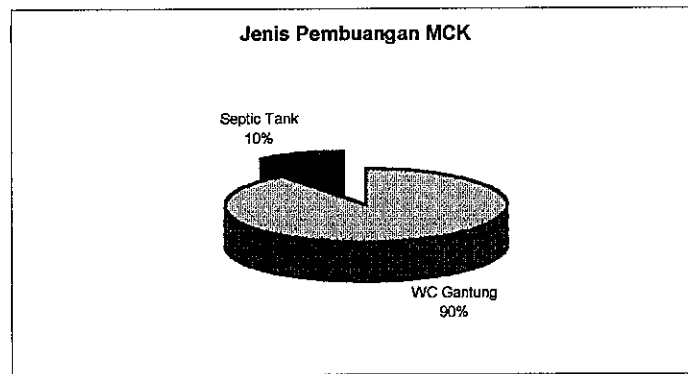
Gambar 4.24. Grafik tingkat kepuasan prasarana jalan
(Sumber : Survai, 2004)



Gambar 4.25. Jenis prasarana jalan
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.4.9. Pelayanan Sarana Buangan MCK

Berdasarkan survai dan wawancara, rata-rata responden yang menempati permukiman atas laut tidak mempunyai saluran buangan atau jamban keluarga yang dilengkapi tangki septik (*Septic Tank*). Dari data terdapat 90 % responden hanya menggunakan WC gantung yang saluran buangnya langsung ke laut. Adapun 10 % responden lainnya sudah menggunakan saluran dengan menggunakan tangki septik karena tempat tinggal yang berada dekat darat (gambar 4.26 – 4.28).



Gambar 4.26. Jenis pembuangan MCK
(Sumber : Survai, 2004)



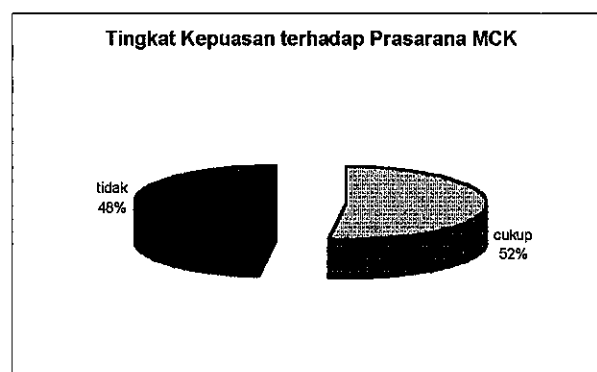
Gambar 4.27. Jenis WC gantung yang dipakai oleh masyarakat



Gambar 4.28. Jenis WC yang memakai *septic tank*
(dipakai pada rumah yang terletak di dekat area daratan)
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.4.10. Tingkat Kepuasan terhadap Prasarana MCK

Sebagian besar responden menyatakan cukup puas dengan kondisi saluran buangan MCK yang ada meski secara fisik tidak permanen dan tidak memenuhi syarat kesehatan. Responden lainnya merasa tidak puas dengan kondisi tersebut dan berharap bisa menggunakan buangan MCK yang memadai dan sehat (gambar 4.29).

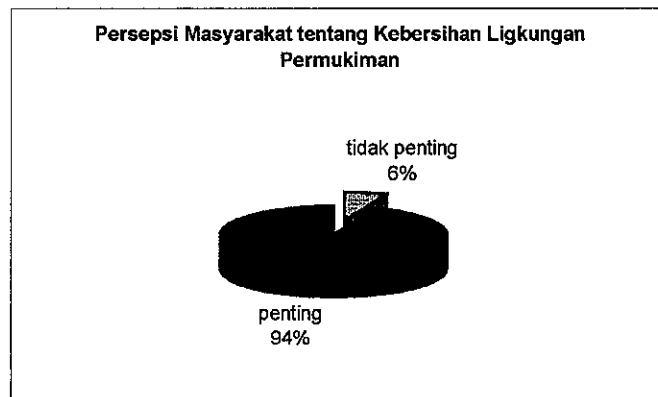


Gambar 4.29. Grafik tingkat kepuasan terhadap prasarana MCK
(Sumber : Survai, 2004)

4.2.5. Kegiatan Bersama Masyarakat

4.2.5.1. Persepsi Masyarakat tentang Kebersihan Lingkungan Permukiman

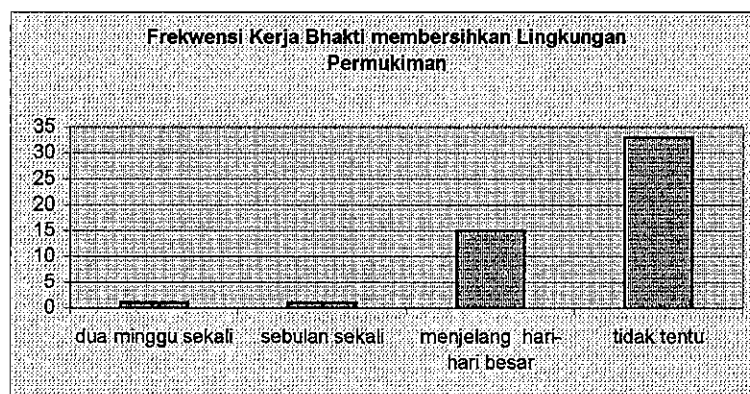
Secara fisik lingkungan permukiman atas laut terlihat kotor dan kumuh, meskipun demikian sebagian besar responden menyatakan penting dan ikut bertanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan permukiman tersebut, sehingga diperoleh persepsi masyarakat tentang kebersihan lingkungan yaitu 94 % responden berpersepsi kebersihan permukiman penting sedangkan 6 % lainnya menganggap tidak penting (gambar 4.30).



Gambar 4.30. Persepsi masyarakat tentang kebersihan Lingkungan Permukiman (Sumber : Survei, 2004)

4.2.5.2. Frekwensi Kerja Bhakti membersihkan Lingkungan Permukiman

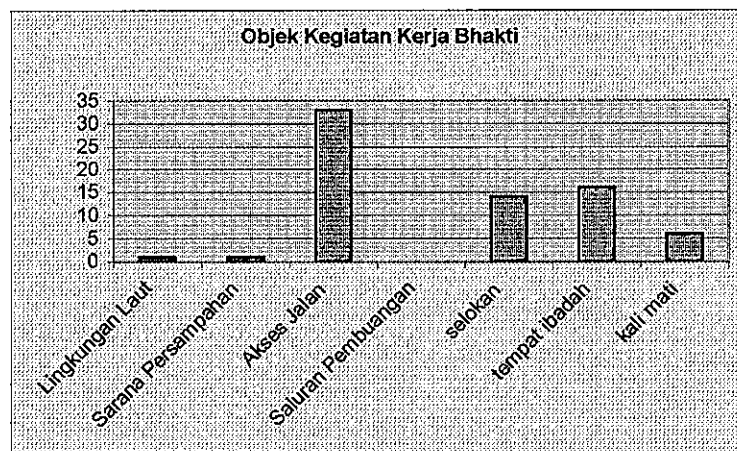
Umumnya responden menyatakan terlibat dalam kegiatan membersihkan lingkungan permukiman tetapi dilakukan dalam waktu yang tidak tentu sesuai kebutuhan atau ada pemberitahuan sebelumnya. Responden juga menyatakan bahwa tidak ada program khusus melaksanakan kerja bhakti membersihkan lingkungan permukiman atas laut baik di lingkungan RT/RW maupun kelurahan setempat bahkan lebih jauh masyarakat permukiman tersebut mengharapkan peran pemerintah (gambar 4.31).



Gambar 4.31. Persepsi masyarakat dan Frekwensi Kerja Bhakti membersihkan Lingkungan Permukiman (Sumber : Survei, 2004)

4.2.5.3. Objek Kegiatan Kerja Bhakti

Berdasarkan data, rata-rata responden menyatakan objek yang paling sering dibersihkan atau dilakukan kerja bhakti adalah jalan-jalan umum saja sedangkan objek kegiatan kerja bhakti lainnya yaitu tempat ibadah, selokan dan kali mati. Hal ini pun dilakukan tidak tentu atau menjelang hari-hari besar saja. Sedangkan lingkungan pesisir dan laut yang tercemar sampah tidak menjadi prioritas kerja bhakti karena area laut yang cukup luas (gambar 4.32).



Gambar 4.32. Objek Kegiatan Kerja Bhakti
(Sumber : Survai, 2004)

4.3. Pembahasan

Berdasarkan penelitian pada permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur, temuan secara visual bahwa kualitas lingkungan kotor dan telah tercemar oleh sampah yang bersumber dari aktivitas rumah tangga dan kegiatan usaha masyarakat setempat. Wilayah pesisir tidak saja dimanfaatkan sebagai tempat bermukim tetapi juga dijadikan tempat buangan sampah. Perilaku masyarakat membuang sampah langsung ke laut tanpa disadari ternyata membawa dampak negatif terhadap penurunan kualitas lingkungan pesisir.



Gambar 4. 33. Kondisi laut tercemar sampah pada permukiman di kawasan pesisir kelurahan Makassar Timur. (Sumber : Survai, 2004)

Kondisi yang terjadi adalah merupakan cerminan kehidupan masyarakat pesisir yang ada di permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur. Tercemarnya lingkungan fisik oleh sampah dapat menyebabkan penyakit pada manusia, juga mempunyai pengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan dan nilai estetika secara visual. Selanjutnya menyebabkan ketidaknyamanan yang dirasakan bagi masyarakat setempat. Faktor penyebab sehingga perilaku masyarakat cenderung membuang sampah langsung ke laut karena pada permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur tidak dilengkapi dengan sarana dasar permukiman khususnya sarana sampah untuk mendukung fungsi permukiman dan aktivitas pemukim di permukiman tersebut.

4.3.1. Kesesuaian Peruntukan Ruang Pesisir di Kelurahan Makassar Timur

Regulasi daerah yang berkaitan dengan penanganan kawasan permukiman dan pemanfaatan ruang di kawasan pesisir Kota Ternate masih bersifat umum, sedangkan peraturan pengendalian dan pengelolaan prasarana lingkungan belum ada. Rencana penanganan menyangkut masalah sanitasi lingkungan secara detail diatur dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) tahun 2001-2005. Hal ini tentu sangat ironis bagi kota pulau yang seluruh wilayah dikelilingi oleh laut dan merupakan aset daerah yang semestinya

dijaga dan dikontrol melalui aturan jelas yang mengatur dan membatasi pemanfaatan kawasan pesisir sehingga dampak pencemaran tidak terjadi.

4.3.1.1. Perda Nomor 1 Tahun 2001 Tentang Tata Ruang Kota

Peraturan mengenai Rencana umum Tata Ruang Kota (RUTRK) Ternate yang dijabarkan melalui Rencana Detail Tata Ruang Kota tahun 2001-2005. Kelurahan Makassar Timur adalah merupakan Bagian Wilayah Kota I (BWK I) Ternate yang memang diperuntukan untuk kegiatan intensitas tinggi dan salah satunya adalah pertumbuhan permukiman yang cukup pesat.

Perda tentang tata ruang kota ini belum secara khusus mengatur, karena Kota Ternate belum memiliki Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) yang lebih detail mengatur penggunaan ruang pesisir, khususnya dengan fungsi permukiman. Padahal kondisi yang terjadi di kelurahan Makassar Timur memiliki permukiman atas laut selain permukiman di darat, sehingga untuk penataan kawasan permukiman atas laut yang memiliki karakteristik wilayah dan permasalahan berbeda dengan kondisi permukiman di darat, maka sangat diharapkan ada regulasi daerah tentang tata ruang kota yang secara detail mengatur penggunaan ruang pesisir, khususnya pemanfaatan kawasan atas laut sebagai permukiman.

4.3.1.2. Penataan Garis Sempadan Pantai

Berdasarkan SK Menteri Lingkungan Hidup nomor 29 tahun 1993 menyatakan bahwa setiap bangunan yang berada di sepanjang pesisir pantai dan sungai minimal berada pada jarak 50 sampai 100 meter dari titik pasang surut tertinggi. Kondisi yang terdapat di kelurahan Makassar Timur tentang perubahan garis sempadan pantai melalui penataan kawasan pantai yang padat penduduk permukiman telah menyalahi ketentuan yang berlaku, karena pada wilayah ini telah dipadati oleh permukiman mencapai lebih dari 250 meter dari titik pasang tertinggi ke arah laut.

Arahan tentang penataan pemanfaatan ruang pesisir cukup sulit dilaksanakan, mengingat hampir keseluruhan masyarakat secara sah memiliki sertifikat terhadap lahan permukiman atas laut tersebut. Koordinasi dan ketegasan aparat terkait dalam melakukan penataan juga masih rendah.

Peraturan penataan garis sempadan pantai untuk pembangunan sudah jelas diatur, selanjutnya perlu koordinasi dari dinas tata kota dengan kelurahan setempat untuk mengontrol

dan membatasi pertumbuhan permukiman agar tidak semakin menjorok ke arah laut lagi karena telah melewati batas yang ditetapkan.

3.1.3. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2001 Tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Ternate

Peraturan daerah ini memuat misi kota sebagai kota pantai atau kota pulau, sedangkan visi yang ingin dicapai adalah terbangunnya kota yang memiliki keseimbangan ekologis, geologis, dan topografi sesuai kondisi geografis menuju terciptanya kawasan pesisir yang tertata indah, bersih, dan sehat. Namun kondisi permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur sebagai salah satu identitas dari kota pulau belum mendapat penataan standar sesuai fungsi yang semestinya. Kota Ternate juga memiliki strategi penataan ruang tentang arah kebijakan permukiman yaitu :

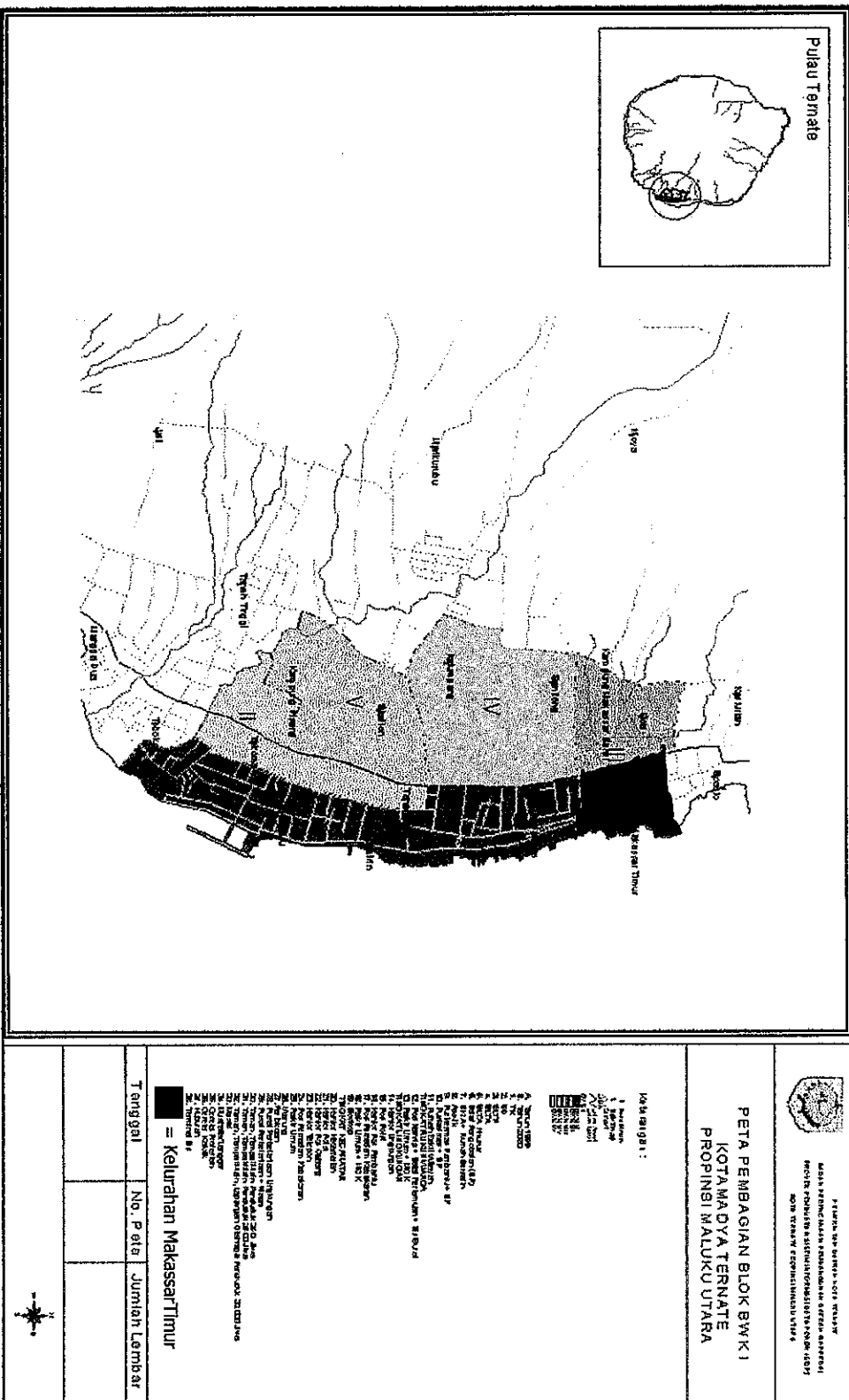
- Pembangunan permukiman diarahkan pada perbaikan dalam rangka kualitas hunian dan lingkungannya serta meningkatkan secara kuantitas dan kualitas pelayanan prasarana dasar permukiman.

Penyehatan lingkungan permukiman dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dan lingkungannya diupayakan dengan pengelolaan sampah, penanganan drainase dan penanganan air limbah.

Tercemarnya lingkungan pesisir merupakan dampak dari keberadaan permukiman tersebut serta perilaku masyarakat yang menempatinnya. Faktor ketersediaan sarana dasar permukiman menjadi sangat penting untuk menunjang aktivitas hidup penduduk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah kota Ternate perlu meningkatkan kinerjanya secara serius melibatkan koordinasi instansi terkait dan masyarakat untuk mencapai visi dan misi kota pantai dengan meningkatkan prasarana dasar permukiman atas laut sehingga dampak terhadap kawasan pesisir bisa dikurangi dan untuk mendapatkan kualitas hunian dan kualitas lingkungan menjadi lebih baik.

4.3.1.4. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 Tentang Program Pembangunan Daerah Kota Ternate

Peraturan ini merupakan landasan pelaksanaan pembangunan di berbagai bidang di kota Ternate, yang memuat arahan dan kebijakan yang harus dilaksanakan dalam periode lima tahun (2001-2005), yang terdiri dari pembangunan hukum, politik, agama, pendidikan, sumber daya alam dan lingkungan, kawasan strategis dan ketertiban.



Gambar 4.34. Peta pembagian Blok BWK I Kota Ternate
Sumber : BAPPEDA Kota Ternate, 2001

Tetapi arahan dan kebijakan program pembangunan lingkungan hidup yang ada sekarang belum sepenuhnya terakomodasi untuk bidang permukiman khususnya dengan kondisi yang ada di kelurahan Makassar Timur, sehingga untuk ke depan perlu diatur lebih sesuai kondisi, sasaran dan target dari program ini. Adapun program pembangunan permukiman yang terakomodasi dalam peraturan ini masih terbatas pada pembangunan prasarana yang berorientasi ekonomi dan belum tersentuh pada peningkatan utilitas lingkungan yang menunjang fungsi permukiman tersebut.

Kondisi menurunnya kualitas lingkungan pesisir yang terdapat di kelurahan Makassar Timur merupakan realitas dampak dari keberadaan permukiman, yang perlu mendapat perhatian penting pemerintah secara tegas untuk menerapkan regulasi daerah terhadap penggunaan kawasan pesisir khususnya dan penataan kawasan permukiman yang sudah ada sehingga dapat menjadi salah satu identitas dari kota pantai.

4.3.2. Analisa Kebutuhan Prasarana Lingkungan Permukiman

4.3.2.1. Pelayanan Air Bersih

Berdasarkan survai pada permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur, pelayanan terhadap kebutuhan air bersih penduduk cukup bervariasi. Sebagian besar responden yaitu 67 % menggunakan air bersih dari pelayanan PDAM, sedangkan 33 % responden lainnya masih menggunakan sumur gali/bor. Penggunaan air bersih oleh masyarakat setempat selain untuk minum dan memasak juga digunakan untuk keperluan MCK.

Sumber air dari PDAM untuk kebutuhan penduduk permukiman atas laut disalurkan langsung melalui jaringan pipa distribusi PDAM yang terletak di jalan Yasin Gamsungi, air dialirkan dengan pipa-pipa PVC yang ditempatkan di bawah akses jalan papan menuju rumah-rumah penduduk. Sumur gali/bor bersumber dari air tanah di permukiman dekat daratan, dengan menggunakan pompa dialirkan melalui pipa menuju rumah-rumah penduduk atas laut. Selama ini terdapat tiga titik sumber mata air sumur gali/bor dekat darat yang biasanya digunakan penduduk permukiman atas laut dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Pelayanan penggunaan air bersih dari PDAM dan sumur gali/bor untuk kebutuhan hidup penduduk permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur telah dirasakan cukup oleh 84 % responden sedangkan 16 % responden lainnya merasa kurang dalam kecukupan pelayanan air bersih khususnya pelayanan dari PDAM karena aliran air tidak selalu mengalir tiap hari. Kinerja PLN dalam peningkatan pelayanan terhadap kebutuhan listrik permukiman menjadi harapan besar penduduk setempat.

4.3.2.2. Pelayanan Sarana Sampah

Berdasarkan pengamatan lapangan, umumnya penduduk permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur beraktivitas dan membuang sampah rumah tangga langsung ke laut. Dari data diketahui mencapai 80 % responden yang tinggal di permukiman atas laut membuang sampah rumah tangga maupun sampah dari aktivitas lainnya langsung ke laut. Sementara 8 % responden lainnya membuang sampah ke kali mati/kering karena lokasi rumah sangat berdekatan dengan kali mati tersebut. Selebihnya 12 % responden yang tinggal dekat darat dan kelancaran dalam akses pengangkutan sampah oleh Dinas Kebersihan Kota Ternate telah membuang sampah rumah tangga ke bak-bak sampah yang tersedia di pinggir jalan.

Lingkungan permukiman yang kotor juga memberi dampak ketidaknyamanan bagi penduduk setempat berupa bau tidak sedap dari kotoran dan lumpur yang tidak terbawa arus laut terutama rumah penduduk dekat darat. Kondisi seperti ini turut mempengaruhi kesehatan masyarakat, berdasarkan hasil kuesioner diketahui penyakit yang sering diderita responden 42 % adalah influenza, 25 % menderita demam dan malaria sedangkan 2 – 3 % lainnya menderita batuk dan rheumatik. Data Dinas Kesehatan juga diketahui bahwa angka tertinggi penyakit yang diderita penduduk permukiman atas laut adalah penyakit saluran pernapasan dan malaria. Dampak fisik lain yang nyata terlihat dengan kondisi permukiman yang kotor adalah permukiman tersebut terkesan kumuh dan tidak memiliki nilai estetika visual. Kondisi seperti ini memperjelas bahwa permukiman penduduk di atas laut tidak dilengkapi oleh sarana sampah baik oleh swadaya masyarakat sendiri maupun pemerintah. Tidak adanya fasilitas sampah yang mendukung permukiman tersebut membuat kecenderungan masyarakat membuang sampah langsung ke laut. Faktor penyebab lainnya adalah akses jalan yang sempit dan tidak permanen membuat kesulitan dalam menjangkau lokasi unit rumah untuk pengangkutan sampah di permukiman tersebut. Mengingat tingkat kepadatan penduduk di permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur cukup tinggi maka volume sampah dari rumah tangga yang dibuang ke laut juga besar.

Untuk itu diperlukan swadaya masyarakat sendiri untuk menampung sampah sementara di karung atau kantong-kantong sampah di rumah, kemudian diangkut oleh gerobak sampah keliling dari Dinas Kebersihan Kota. Gerobak sampah keliling adalah solusi yang direkomendasikan untuk kemudahan pengangkutan sampah dalam mencapai unit-unit rumah di permukiman tersebut, karena kondisi jalan sempit dan terbuat dari papan sehingga sangat sulit untuk dilewati mobil pengangkut sampah. Cara ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang terbuang ke laut sehingga lingkungan hunian dan kawasan pesisir menjadi bersih dan sehat



Gambar 4.35. Kali mati /kering sebagai tempat pembuangan sampah. (Sumber: Survai, 2004)

4.3.2.3. Pelayanan Akses Jalan

Sarana jalan yang ada di permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur adalah jalan-jalan terbuat dari papan dengan tiang-tiang penopang dari kayu, dan hanya sebagian kecil saja jalan yang permanen karena terbuat dari beton. Lebar akses jalan yang menghubungkan rumah-rumah penduduk adalah 1 - 1,5 meter (gambar 4.36).



Gambar 4.36. Akses jalan yang berasal dari swadaya masyarakat. (Sumber: survai, 2004)

Umumnya jalan-jalan tersebut berasal dari swadaya masyarakat setempat, namun pada awal tahun 2003 kelurahan Makassar Timur khususnya permukiman atas laut mendapat bantuan dari pemda tingkat I berupa proyek pembangunan jalan beton/permanen sepanjang 200 meter, dengan lebar 3 meter yang berada di sisi selatan permukiman tersebut dan merupakan akses menuju kawasan terminal baru dan pusat perdagangan kota.

Jalan-jalan tersebut merupakan akses utama menuju permukiman dekat darat di jalan Yasin Gamsungi, juga memiliki fungsi sebagai ruang bagi penempatan jaringan pemipaan PDAM untuk mensuplai kebutuhan air bersih penduduk.

Dengan padatnya jumlah penduduk yang tinggal di permukiman atas laut maka akses jalan untuk menghubungkan rumah-rumah penduduk juga semakin banyak, namun sulit untuk menjangkau rumah-rumah tersebut dengan menggunakan kendaraan karena kondisi jalan tidak permanen dan sempit. Saat ini kepadatan penduduk permukiman atas laut mencapai 534 jiwa/ Ha maka pembangunan rumah juga semakin bertambah menjorok ke arah laut mencapai 250 meter.

Dengan melihat kondisi permukiman sekarang maka solusinya pada peran pemerintah daerah khususnya dinas Pekerjaan Umum dan Tata kota untuk penataan kawasan permukiman yang lebih baik dengan melengkapi sarana jalan yang memadai dengan konstruksi beton yang lebih lebar dari sebelumnya, untuk menunjang fungsi permukiman dan akses kemudahan penduduk setempat dalam beraktivitas. Keuntungan lain dari jalan dengan konstruksi beton adalah dapat menjadi barrier antar rumah dari kemungkinan terjadi kebakaran. Selain itu dapat memberi penegasan batas lingkungan bagi lingkungan permukiman di atas laut.

4.3.2.4. Pelayanan Listrik

Sarana listrik adalah termasuk kebutuhan mendasar dari penduduk permukiman atas laut. Fungsi sarana listrik tidak saja sebagai penerangan rumah-rumah penduduk, tetapi menjadi penerangan bagi dengan kondisi yang sempit dan letak permukiman yang berada di atas laut, sehingga keberadaan sarana listrik sangat memudahkan penduduk untuk beraktivitas di malam hari.

Umumnya sarana listrik yang digunakan penduduk setempat bersumber dari PLN (Perusahaan Listrik Negara). Berdasarkan survai, mencapai 94 % responden permukiman atas laut menggunakan pelayanan sarana listrik dari PLN, sedangkan 6 % responden lainnya belum terpasang aliran listrik tersebut, dan masih menggunakan penerangan dari lampu minyak.

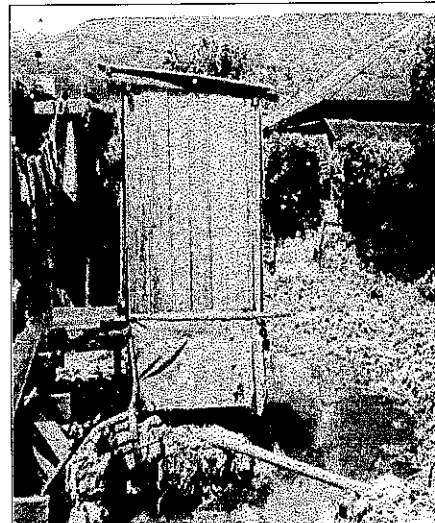
Adapun tingkat pelayanan dari PLN telah dirasakan cukup oleh 62 % responden permukiman tersebut, sedangkan 38 % responden lainnya menyatakan PLN perlu meningkatkan pelayanannya karena dalam seminggu aliran listrik dari PLN sering padam. Sarana listrik sebagai fasilitas dasar permukiman dari PLN sangat membantu kebutuhan penduduk di permukiman ini, tetapi lebih jauh PLN perlu meningkatkan pelayanannya sehingga kebutuhan penduduk tercukupi.

4.3.2.5. Pelayanan Sarana Buangan MCK

Hasil penelitian ditemukan bahwa umumnya rumah-rumah penduduk permukiman atas sudah memiliki kamar mandi dan jamban keluarga, tetapi konstruksinya sangat sederhana dengan lantai papan dan memiliki lubang kakus terbuat dari plat seng tanpa dilengkapi saluran buangan tangki septik (*septic tank*) pada umumnya rumah-rumah di daratan.

Umumnya 90 % responden yang tinggal di permukiman atas laut hanya menggunakan WC gantung atau WC tanpa tangki septik dengan pembuangan langsung ke laut. Sementara 10 % responden lainnya sudah menggunakan saluran buangan dengan tangki septik, terutama penduduk yang bertempat tinggal dekat daratan. Dengan gambaran kondisi permukiman atas laut yang seperti ini tentunya juga memberi dampak buruk pada kondisi sanitasi lingkungan permukiman dan ketidaknyamanan penduduk terhadap kuantitas lumpur tinja yang memberi dampak bau tidak sedap.

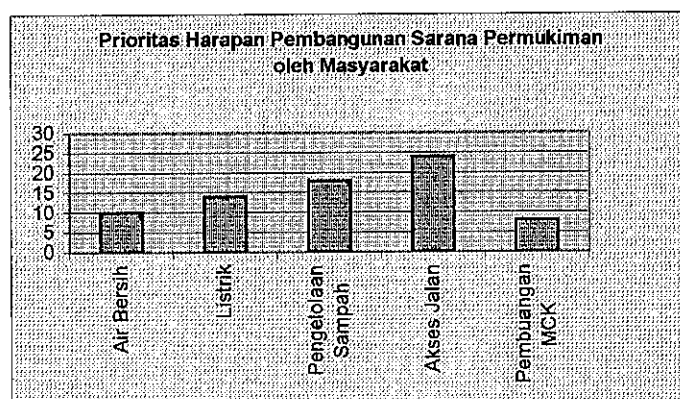
Peran pemerintah khususnya dinas pekerjaan umum sangat diharapkan dapat mencari solusi penanganan buangan limbah tinja untuk diterapkan di permukiman atas laut. Pendekatan masalah yang dapat direkomendasikan untuk penggunaan tangki septik pada kondisi permukiman atas laut perlu memperhitungkan karakteristik wilayah yang ada. Jaringan perpipaan limbah tinja dari unit-unit rumah penduduk dapat diletakkan di bawah kolong-kolong jalan kemudian dihubungkan dengan sistem pengolahan limbah tinja sementara yang dibangun di darat, selanjutnya dibuang pada fasilitas IPLT (Instalasi Pengolahan Limbah dan Tinja) yang telah dimiliki Kota Ternate.



Gambar 4.37. Jenis WC tanpa *Tangki Septik* yang banyak dipakai.
(Sumber: survai, 2004)

Meskipun kondisi sarana MCK penduduk permukiman atas laut masih sederhana, namun 52 % responden menyatakan cukup puas dengan kondisi fasilitas MCK yang telah ada. Tetapi 48 % responden lainnya merasa perlu adanya peningkatan sarana MCK secara fisik memadai dan memenuhi standar kesehatan.

Hasil Wawancara dengan masyarakat diketahui besar harapan masyarakat permukiman atas laut untuk memiliki prasarana lingkungan permukiman yang memadai untuk menunjang aktivitas hidup masyarakat setempat. Kebutuhan infrastruktur masyarakat setempat berbeda-beda, namun kebutuhan yang menjadi prioritas harapan terbesar masyarakat setempat adalah memadainya akses jalan yang lebih lebar dengan konstruksi beton. Kebutuhan masyarakat lainnya yaitu tersedianya sarana sampah untuk mengurangi volume sampah yang terbuang ke laut, peningkatan dalam pelayanan listrik, air bersih dan saluran buangan MCK yang lebih baik dan layak untuk melayani aktifitas hidup penduduk permukiman (lihat gambar 4.38).



Gambar 4.38. Prioritas Harapan pembangunan sarana permukiman oleh masyarakat
(Sumber: survai, 2004)

4.3.3. Analisis Peran Serta Masyarakat dalam Kegiatan Bersama

Untuk melihat seberapa besar peran yang diberikan masyarakat permukiman atas laut dalam pengelolaan lingkungan pesisir, maka dapat dilakukan pendekatan dari sisi karakteristik masyarakat dan persepsi masyarakat, proses terjadinya keterlibatan dalam bentuk gerakan serta kendala-kendala yang menghambat pelaksanaan peran serta tersebut.

Menurut Inmendagri nomor 30 tahun 1990 tentang Pembiayaan Pemeliharaan Lingkungan Hidup, Utilitas umum dan Fasilitas sosial Perumahan, dikatakan pemerintah daerah bersama masyarakat wajib memelihara dan mengelola prasarana lingkungan, utilitas umum dan fasilitas sosial, sehingga perlu memanfaatkan keikutsertaan masyarakat secara optimal.

Berdasarkan wawancara, umumnya kegiatan bersama dalam masyarakat di permukiman atas laut adalah pertemuan dalam arisan kerukunan/kesukuan dan PKK sedangkan pertemuan warga yang berhubungan dengan kegiatan membersihkan lingkungan sangat jarang dilakukan kecuali menjelang hari-hari besar saja.

4.3.3.1. Persepsi Masyarakat tentang Kebersihan Lingkungan Permukiman

Temuan hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan permukiman atas laut kotor dan kumuh. Dari hasil wawancara diketahui persepsi masyarakat dalam menjaga lingkungan permukiman berbeda-beda. Secara umum yaitu 94 % responden menyatakan kebersihan lingkungan adalah hal penting dan merasa ikut bertanggung jawab terhadap kondisi permukiman yang ada dan mengharapkan terciptanya perbaikan lingkungan permukiman yang lebih bersih dan sehat.

Tetapi 6 % responden lainnya menyatakan kebersihan lingkungan permukiman bukan merupakan hal yang utama, yang penting adalah dapat bertahan hidup saja.

Tingkat pendidikan penduduk tidak banyak berpengaruh terhadap kesadaran untuk tidak membuang sampah langsung ke laut, karena yang terjadi meskipun umumnya penduduk sadar terhadap kebersihan lingkungan permukiman akan tetapi dengan tidak tersedianya sarana sampah di permukiman ini, maka laut tetap menjadi tempat buangan sampah. Penduduk permukiman ini cenderung mengharap lebih kepada peran pemerintah setempat dan menganggap hal tersebut adalah tanggung jawab pemerintah semata, untuk penataan kawasan permukiman dengan fasilitas permukiman yang lebih baik.

Kesadaran untuk tidak membuang sampah ke laut dan ruang pesisir perlu ditunjang dengan fasilitas sarana sampah yang menjangkau unit-unit rumah penduduk untuk mengubah perilaku penduduk yang biasanya membuang sampah langsung ke laut menjadi perilaku membuang sampah ke bak sampah atau gerobak sampah keliling. Pendekatan lain yang bisa di terapkan dalam masyarakat sendiri adalah adanya program-program kerja bhakti mingguan atau bulanan di tingkat RT/RW dan kelurahan sebagai bentuk kegiatan bersama dan gerakan nyata menjaga kebersihan lingkungan permukiman sekaligus lingkungan pesisir. Pemberdayaan dan Keaktifan organisasi kelembagaan masyarakat seperti LKMD, PKK, Karang Taruan dan Remaja Masjid dapat menjadi jembatan koordinasi kegiatan membersihkan lingkungan permukiman antara kelurahan dan masyarakat.

4.3.3.2. Frekwensi Kerja Bhakti Membersihkan Lingkungan Permukiman

Kerja bhakti membersihkan lingkungan adalah salah satu cara tepat yang perlu di terapkan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Hasil wawancara dengan responden permukiman atas laut, dapat diketahui frekwensi keterlibatan masyarakat setempat dalam menjaga dan membersihkan lingkungan permukiman. Umumnya penduduk permukiman atas laut menyatakan bahwa dalam masyarakat sendiri tidak ada program tetap membersihkan lingkungan permukiman baik di tingkat RT/RW maupun tingkat kelurahan. Frekwensi kerja bhakti yang dilakukan penduduk juga tidak tentu waktunya dan hanya dilakukan menjelang hari-hari besar saja.

Objek yang paling sering menjadi tempat kegiatan kerja bhakti adalah akses jalan khususnya jalan-jalan dekat darat, tempat ibadah, selokan-selokan dan kali mati/kering. Lingkungan pesisir khususnya laut kurang menjadi prioritas kerja bhakti karena area laut yang luas dan cukup menyulitkan. Lebih lanjut penduduk permukiman ini menganggap kebersihan kawasan pesisir adalah tanggung jawab pemerintah daerah.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Pemanfaatan ruang pesisir yang ada di kelurahan Makassar Timur kota Ternate adalah pemanfaatan ruang sebagai permukiman. Dampak dari keberadaan permukiman atas laut ini adalah menurunnya kualitas lingkungan pesisir karena kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam membuang sampah rumah tangga dan sampah dari kegiatan usaha langsung ke laut. Akibatnya lingkungan permukiman yang berada di kawasan pesisir menjadi kotor dan tidak sehat. Lebih lanjut lingkungan permukiman yang kotor dan tidak sehat ini memberi kesan kumuh dan memburuknya nilai estetika lingkungan pesisir.

Akibat lain yang dirasakan penduduk permukiman tersebut dari lingkungan pesisir yang kotor adalah ketidaknyamanan hidup yang disebabkan bau tidak sedap dari timbulan sampah dan limbah tinja yang juga dibuang langsung ke laut. Faktor ketidaknyamanan hidup dengan kondisi yang ada tentunya berpengaruh terhadap penurunan kualitas hidup seperti gangguan kesehatan bagi penduduk setempat.

Tidak tersedianya fasilitas yang mendukung fungsi permukiman atas laut khususnya sarana sampah memberi pengaruh besar terhadap perilaku masyarakat dalam membuang sampah langsung ke laut. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan membersihkan lingkungan pesisir juga menjadi penyebab menurunnya kualitas lingkungan pesisir.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur sebagai bentuk dari pemanfaatan ruang pesisir, di peroleh gambaran kondisi permukiman atas laut dan lingkungan pesisir sebagai hasil temuan dalam penelitian.

Gambaran kondisi permukiman atas laut berdasarkan hasil penelitian, yaitu :

1. Kesesuaian peruntukan ruang pesisir di Kelurahan Makassar Timur
 - Regulasi yang berkaitan dengan penanganan kawasan permukiman dan pemanfaatan ruang pesisir di Kota Ternate masih bersifat umum. Penanganan masalah sanitasi lingkungan khususnya kawasan pesisir secara detail dalam Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) belum dimiliki Kota Ternate.

- SK Menteri KLH nomor 29 tahun 1993 tentang batasan bangunan terhadap garis sempadan di sepanjang pesisir minimal 50-100 meter, sangat sulit diterapkan karena bertolak belakang dengan kondisi yang terjadi di permukiman atas laut.
 - Peraturan Daerah nomor 3 Tahun 2001 tentang program pembangunan daerah Kota Ternate, belum sepenuhnya diterapkan, karena program pembangunan lingkungan hidup belum sepenuhnya terakomodasi untuk bidang permukiman dengan kelengkapan prasarana khususnya dengan permukiman yang terletak di atas laut.
2. Kondisi Prasarana Lingkungan Permukiman atas laut Kelurahan Makassar Timur
- Prasarana air bersih penduduk pada permukiman atas laut bersumber dari PDAM dan sumur gali/bor.
 - Prasarana sampah tidak tersedia di permukiman atas laut. Masyarakat umumnya membuang langsung ke laut, kali mati/kering.
 - Prasarana jalan di permukiman atas laut, sangat sempit dan umumnya terbuat dari papan dengan penopang tiang kayu.
 - Sumber listrik pada permukiman atas laut umumnya berasal dari pelayanan PLN.
 - Saluran Buangan MCK masyarakat setempat umumnya masih sederhana tanpa menggunakan tangki septik.
3. Partisipasi Masyarakat di permukiman atas laut Kelurahan Makassar Timur
- Penduduk permukiman atas laut tidak memiliki program mingguan atau bulanan sebagai bentuk kegiatan bersama untuk membersihkan lingkungan baik di tingkat RT/RW dan kelurahan.
 - Frekwensi kerja bhakti yang dilakukan untuk membersihkan lingkungan pesisir tidak tentu dan menjelang hari-hari besar saja. Objek yang biasanya menjadi tempat kerja bhakti yaitu jalan, tempat-tempat ibadah, selokan dan kali mati/kering.
 - Tidak berfungsinya organisasi kelembagaan masyarakat seperti LKMD, PKK, Karang Taruna dan Remaja Masjid untuk menciptakan koordinasi dengan masyarakat dalam kegiatan bersama membersihkan lingkungan.

5.2. Rekomendasi

- Perlu ada konsep pengaturan pemanfaatan ruang pesisir secara lebih spesifik dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota yang dapat diwujudkan sebagai model pemanfaatan ruang pesisir sebagai permukiman di atas laut dan tertuang dalam Peraturan Daerah, yang secara fisik mengatur tentang :

1. Batasan penggunaan dan pemanfaatan ruang pesisir untuk pembangunan permukiman.
 - Pemanfaatan ruang pesisir yang masih alami diusahakan sedapat mungkin tidak digunakan untuk fungsi permukiman dan pelaksanaan pembangunan disepanjang ruang pesisir harus memperhatikan aturan sempadan pantai dan sungai yang telah ditetapkan dalam SK Menteri LH nomor 29 tahun 1993.
 - Untuk kondisi ruang pesisir yang telah dimanfaatkan sebagai fungsi permukiman perlu ada langkah-langkah penghentian pemakaian wilayah yang lebih luas kearah laut sehingga pada kasus Kelurahan Makassar Timur yang penggunaan ruang pesisir untuk permukiman penduduk di atas laut telah mencapai 250 meter ke arah laut, juga perlu dihentikan untuk mengurangi dampak lingkungan yang lebih besar.
 - Batasan luasan ini juga untuk mendukung terciptanya aksesibilitas pencapaian dan pengelolaan sampah ke unit-unit permukiman yang lebih baik.
2. Batasan terhadap kegiatan usaha yang menghasilkan volume sampah dalam skala besar yang kemudian memberi dampak terhadap penurunan kualitas lingkungan pesisir.
 - Pada kondisi pemanfaatan ruang pesisir sebagai fungsi permukiman sebaiknya dilarang adanya perubahan fungsi unit permukiman menjadi tempat usaha karena akan membuka peluang meningkatnya volume sampah yang lebih besar.
3. Penyediaan prasarana infrastruktur permukiman yang memadai yang mampu mendukung peningkatan kualitas hidup penduduk permukiman.

Yang pelaksanaan dan pengawasannya dilakukan oleh dinas terkait yaitu :

1. BAPPEDA, bertanggung jawab terhadap pengawasan dan pelaksanaan Rencana Detail Tata Ruang Kota secara keseluruhan, khususnya pada pemanfaatan ruang pesisir.
2. Dinas Kimpraswil, bertanggung jawab terhadap pembangunan infrastruktur permukiman atas laut.
3. Dinas Tata Kota, bertanggung jawab terhadap pengembangan dan penataan kawasan permukiman atas laut.

4. Dinas Kebersihan Kota, bertanggung jawab terhadap pelayanan kebersihan kota, khususnya pelayanan pengangkutan sampah pada permukiman atas laut.
 5. Kantor Lingkungan Hidup, bertanggung jawab terhadap pengawasan kualitas lingkungan pesisir.
 6. Dinas Kesehatan, bertanggung jawab terhadap sosialisasi perilaku hidup sehat di permukiman atas laut.
- Penyediaan prasarana infrastruktur dilaksanakan dengan memperhatikan prioritas yang berkembang dari aspirasi masyarakat, yaitu :
 1. Akses jalan, dengan kriteria pengembangan :
 - Lebar yang cukup dan berkonstruksi beton untuk mendukung aktivitas dan pergerakan masyarakat
 - Kemudahan pengelolaan dan pengangkutan sampah yang dapat mencapai ke unit-unit permukiman
 2. Sarana pengelolaan sampah, dengan kriteria pengembangan :
 - Berupa bak sampah dan gerobak sampah yang dapat menjangkau keseluruhan unit-unit permukiman dan ditunjang oleh akses jalan yang memadai.
 3. Pelayanan listrik yang mampu memenuhi kebutuhan untuk menunjang aktivitas masyarakat permukiman atas laut.
 4. Pelayanan air bersih dari PDAM yang terjangkau ke unit-unit permukiman secara keseluruhan untuk kemudahan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
 5. Pembangunan IPLT (Instalasi Pembuangan Limbah dan Tinja) khusus permukiman atas laut, untuk mengatasi limbah tinja yang terbuang langsung ke laut.
 - Partisipasi masyarakat menjadi salah satu bagian penting dari model penataan yang dikembangkan dan didukung oleh program pemerintah untuk menanggulangi permasalahan pemanfaatan pesisir sebagai fungsi permukiman atas laut dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 1. Masalah lingkungan harus mendapat perhatian dan menjadi topik utama dalam forum pertemuan masyarakat sebagai bentuk pro aktif masyarakat terhadap keberlanjutan kawasan pesisir. Hal ini dapat diwujudkan dengan pemberdayaan kelembagaan

masyarakat seperti LKMD, PKK, Karang Taruna dan Remaja Masjid untuk membangun koordinasi antara lembaga masyarakat RT/RW dengan masyarakat untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam upaya menciptakan kelestarian lingkungan pesisir.

2. Perlu adanya kesadaran masyarakat bahwa permasalahan menurunnya kualitas lingkungan akibat timbulan sampah di lingkungan pesisir, merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah.
3. Penanggulangan kondisi dampak lingkungan yang tercemar di lingkungan pesisir memerlukan partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan dan kontribusi langsung yang bersifat mandiri berupa program kerja bhakti mingguan maupun bulanan di tingkat RT/RW maupun kelurahan.

Dari uraian kesimpulan dan rekomendasi yang telah dibahas sebelumnya, maka didapatkan model penataan kawasan permukiman atas laut kelurahan Makassar Timur, yang telah disusun secara skematis untuk dapat diterapkan pada penataan kawasan permukiman yang lebih baik dengan memperhatikan perilaku hidup sehat pemukim, kenyamanan tempat tinggal dan kualitas hidup pemukim terkait dengan membaiknya kualitas lingkungan pesisir. Model penataan ini juga dapat diterapkan di daerah lain yang memiliki karakteristik wilayah dan permasalahan yang sama.

Pemerintah

Data Wilayah :

1. Fisik Dan Lingkungan
 - Topografi
 - Geografis
2. Sosial Kependudukan
3. Ekonomi
4. Sosial – Budaya

- Usaha mempertahankan ruang pesisir yang masih alami
- Penegakkan aturan sempadan pantai dan sungai
- Batasan luasan dan penghaenian pembangunan terhadap kondisi penggunaan dan pemanfaatan ruang pesisir sebagai permukiman
- Larangan terhadap perubahan fungsi permukiman menjadi kegiatan usaha non permukiman yang memiliki potensi menghasilkan sampah / buangan.

Pemerintah dan Masyarakat

- Akses jalan
 - Berkonstruksi beton dan lebar yang cukup untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah
- Sarana pengelolaan sampah rumah tangga
 - Berupa bak sampah dan gerobak sampah yang dapat menjangkau keseluruhan unit-unit permukiman dan ditunjang oleh akses jalan yang memadai
- Pelayanan listrik bersumber dari PLN
- Pelayanan air bersih dari PDAM dan sumur gali yang didistribusi melalui pipa yang ditempatkan dibawah akses jalan
- Penyediaan sarana MCK dengan pembuatan IPLT khusus permukiman atas laut

Masyarakat

- Kesadaran masyarakat
- Pro-aktif masyarakat
- Program mandiri masyarakat

Arahan dan Kebijakan Tata Ruang Kota

Arahan dan Kebijakan Pemanfaatan Ruang Pesisir dalam Tata Ruang Kota

Arahan Pemanfaatan Ruang Pesisir sebagai Permukiman Atas Laut

Ketersediaan Prasarana Permukiman

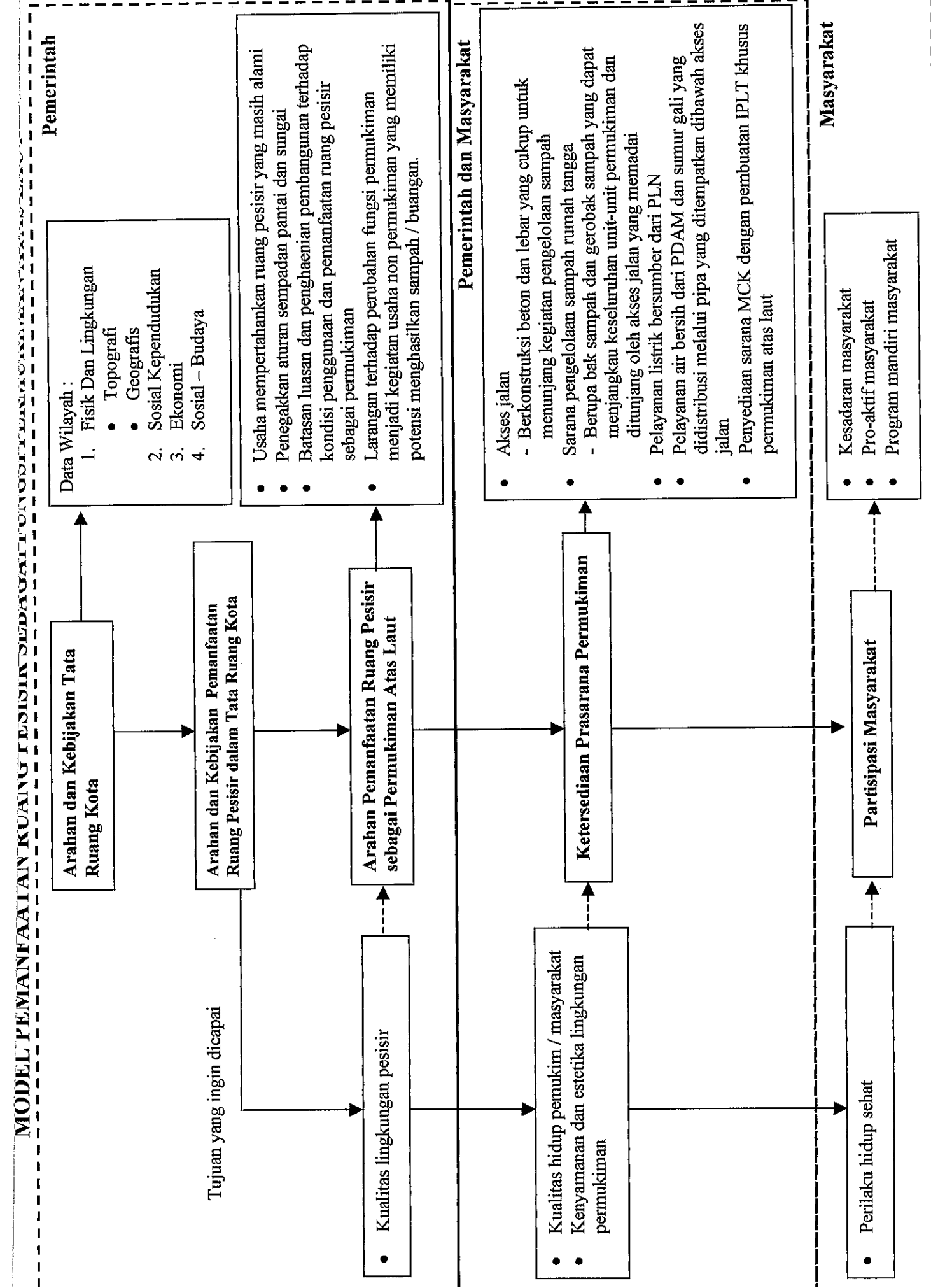
Tujuan yang ingin dicapai

• Kualitas lingkungan pesisir

• Kualitas hidup pemukim / masyarakat
• Kenyamanan dan estetika lingkungan permukiman

Partisipasi Masyarakat

• Perilaku hidup sehat



DAFTAR PUSTAKA

- Hadi, Sudharto. 2000. Dimensi Lingkungan Perencanaan Pembangunan, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Budihardjo Eko, 1994. Percikan Masalah Arsitektur Perumahan Perkotaan. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- John, A.L. 1999. Pengelolaan Terpadu Wilayah Pesisir. Jilid I. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.
- Hartono, I. 2002. Partisipasi Masyarakat dalam evaluasi Pengelolaan Wilayah Pesisir, Undip Semarang.
- Murtanti Jani Rahayu.2001. Pengaruh Peremajaan Partisipatif Terhadap Kondisi Masyarakat Lingkungan. Undip, Semarang.
- Rahmat, Sarwono. 2002. Sistem Pengelolaan Limbah Cair Domestik Pada Permukiman Wilayah Pesisir. ITS, Surabaya.
- Levi, Yair.1986. *Community and Cooperative in Partisipatory Development*. Gower Publishing Company limited, England.
- Dahuri, R. 1987. Buku Pedoman Penyusun Program Pembangunan Prasarana Kota Terpadu, Dirjen Cipta Karya, Pekerjaan Umum, Jakarta.
- Emil, S.1993. Pembangunan Berwawasan Lingkungan, PT Pustaka LP3ES, Jakarta.
- M.S. Supriharyono. 2002. Pelestarian dan Pengelolaan Sumber Daya Alam Wilayah Pesisir. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Pirzam, A.M. 2000. Jurnal Litbang Pertanian, Undip Semarang
- Rais, J. 1996. Perencanaan dan Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu (*Integrated Coastal Zone Planning and Management*), Undip Semarang.
- Rina, Y. 2000. Efektifitas Metode Peran Serta Masyarakat dalam Pembangunan dan Pengelolaan Limbah, Undip Semarang.
- Yudohusodo, dkk.1991. Rumah Untuk Seluruh Rakyat. Unit Percetakan Bharakerta, Jakarta.
- Rietvied P. 1980. *Regional Planning North Holland*, Oxford.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman.
- Dokumen Rencana Detail Tata Ruang Kota Ternate, 2001. Dinas Tata Kota Ternate.
- Ternate dalam angka, 2001. Bappede Kota Ternate.

- Haeruman, H.1996. Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Lingkungan Alam Wilayah Pesisir, KLH Jakarta.
- Hanafie, J.1996. Partisipasi Masyarakat dalam Penyediaan Infrastruktur dan Pelayanan Perkotaan. BPPT, Jakarta.
- Komarudin.1996. Menelusuri Pembangunan Perumahan dan Permukiman. Yayasan Real Estate, Jakarta.
- Wafda, R. 1998. Peran Serta Masyarakat Pinggiran Kota dalam Pengelolaan Prasarana Lingkungan. UGM, Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang.
- Sumanto, 1995. Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan. Andi Offset, Yogyakarta.
- Moleong, Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif, Jakarta.
- Neong, Muhadji.1989. Metodologi Penelitian Kualitatif. Rake Sarasin, Yogyakarta.